



Kementerian PPN/
Bappenas



RINGKASAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2025 - 2029



Kementerian PPN/Bappenas

01. Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN	02
Misi RPJMN	03
17 Program Prioritas	04
8 Program Hasil Terbaik Cepat	05
Sasaran Utama Pembangunan Nasional	06
Kerangka Pikir RPJMN 2025 - 2029	07
Pertumbuhan Ekonomi 8,0 Persen: Prayarat	08
Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas	09

02. Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1	12
Prioritas Nasional 2	18
Prioritas Nasional 3	30
Prioritas Nasional 4	42
Prioritas Nasional 5	57
Prioritas Nasional 6	63
Prioritas Nasional 7	76
Prioritas Nasional 8	90

03. Arah Pembangunan Wilayah

Isu Strategis Kewilayahan	98
Isu dan Tantangan Pembangunan Perdesaan	99
Isu dan Tantangan Pembangunan Perkotaan	100
Isu dan Tantangan Pembangunan IKN	101
Wilayah Sumatera	102
Wilayah Jawa	113
Wilayah Bali - Nusa Tenggara	120
Wilayah Kalimantan	126
Wilayah Sulawesi	134
Wilayah Maluku	142
Wilayah Papua	148

04. Kerangka Pengendalian

Pengendalian Pembangunan Nasional	156
Pengendalian Program Presiden	157
Sistem Informasi Pengendalian	158
Pengendalian melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	159
Tata Kelola Data Pembangunan	160

RPJMN 2025 – 2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025 - 2045. RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Prov/Kab/Kota) dan RKP serta menjadi acuan Badan Usaha/ *Non State Actors*





Kementerian PPN/
Bappenas



01.

Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja.



Misi RPJMN

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi **Prioritas Nasional** dalam RPJMN 2025-2029

"Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029"



Asta Cita

1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



Asta Cita

2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Asta Cita

3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.



Asta Cita

4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;



Asta Cita

5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Asta Cita

6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.



Asta Cita

7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



Asta Cita

8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 Program Prioritas

17 Program Prioritas Presiden

- 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2 Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5 Pemberantasan kemiskinan
- 6 Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
- 15 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16 Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)



01 Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.



02 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.



03 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.



04 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.



05 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.



06 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.



07 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



08 Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



Sasaran Utama Pembangunan Nasional

01

Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju

- GNI Per kapita 7.400-8.240 USD
- Kontribusi PDB Maritim 9,1 %
- Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target tahun 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan.

02

Kemiskinan menurun & Ketimpangan berkurang

- 4,5-5,0% (tingkat kemiskinan ekstrim 0%* di tahun kedua)
- Rasio gini 0,372-0,375
- Kontribusi PDRB KTI 23,3%

04

Peningkatan daya saing sumber daya manusia

- Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

03

Kepemimpinan & pengaruh di dunia Internasional meningkat

- Global Power Indeks berada di rangking 29

05

Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%
- Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20

Keterangan: *Cut off kemiskinan ekstrim: 2,15 GK



Kerangka Pikir RPJMN 2025 - 2029

RPJMN 2025 – 2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.



1 Pendapatan per Kapita setara Negara Maju

- ✓ GNI Per kapita **7.400-8.240 USD**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim **9,1 %**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur **21,9%**



2 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ **4,5-5,0%** (tingkat kemiskinan ekstrem 0%* di tahun kedua)
- ✓ Rasio gini **0,372-0,375**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI **23,3%**



3 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ Global Power Indeks berada di **ranking 29**



Sasaran Utama Pembangunan Tahun 2029



4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) **mencapai 0,59**

Keterangan: *Cut off kemiskinan ekstrem: 2,15 GK



5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK menjadi **62,37%**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi **77,20**

Pertumbuhan Ekonomi 8,0 Persen: Prasyarat

MENCIPTAKAN SUMBER PERTUMBUHAN BARU SISI PRODUKSI (SUPPLY SIDE) YANG MERATA DI SELURUH INDONESIA

Peningkatan produktivitas

- ✓ ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta modernisasi pertanian;
- ✓ **program lumbung pangan desa**
- ✓ **Pembukaan Food Estate**, serta
- ✓ **pengembangan** ekonomi biru.



Pembangunan industri pengolahan bersifat *broad-based* terpilih

- ✓ industri padat karya, kimia dasar, dan semikonduktor
- ✓ **hilirisasi** berbasis sumber daya mineral penting, dan sumber daya alam.
Contoh: **produksi baterai EV** dan ekonomi sirkular.



Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru

- ✓ KI, KEK, dan DPP beserta infrastruktur penunjang



Program peningkatan aktivitas wisatawan bernilai tambah tinggi

- ✓ **pengembangan destinasi**
- ✓ **penciptaan event berkualitas** seperti konser musik, olahraga, dan acara berskala global.



Peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui **program pembangunan sekolah unggulan, Rumah Sakit berkualitas, dan Makan Bergizi Gratis.**



MENINGKATKAN SISI PERMINTAAN (DEMAND SIDE) DIDUKUNG OLEH SEKTOR RIIL, EKSTERNAL, FISKAL, MONETER, DAN KEUANGAN.

Menjaga Konsumsi masyarakat

- ✓ peningkatan peran kelas menengah dan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai program penciptaan tenaga kerja dan kartu usaha produktif dan kesejahteraan



Investasi yang berkualitas

- ✓ mendukung sumber pertumbuhan baru dengan memberikan kepastian usaha
- ✓ Optimalisasi FDI berorientasi ekspor dan melanjutkan pengembangan infrastruktur



Kebijakan fiskal adaptif

- ✓ percepatan peningkatan pendapatan negara,
- ✓ belanja negara untuk penguatan jenis belanja produktif (termasuk R&D),
- ✓ menjaga defisit anggaran untuk menjamin keberlanjutan fiskal.



Peningkatan ekspor dan **terintegrasinya rantai nilai domestik dan global**

- ✓ **Perkuatan** produk berteknologi menengah tinggi yang penyerap tenaga kerja



Dukungan kebijakan moneter

- ✓ kebijakan suku bunga acuan dan sektor keuangan yang pro-growth
- ✓ sistem pembayaran yang pro-stability dan pro-growth.



Mendorong Partisipasi Swasta dan Innovative Financing.



Reformasi struktural melalui reformasi birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah proses perizinan usaha, mengurangi potensi korupsi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja

Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas



Strategi Penurunan Kemiskinan

(4,5 – 5%) dan Peningkatan Proporsi Kelas Menengah (38%)



Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan & Inovatif melalui Kartu Usaha Produktif dan Afirmatif



Perlindungan Sosial yang Integratif, Adaptif dan Inklusif melalui Kartu Kesejahteraan (KIS, PKH, KIP, PBI, subsidi LPG dan Listrik)



Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Pangan dan Perumahan)



Program Kewilayahan, Konektivitas, Pasar Kerja, dan Lainnya



Satu Data Referensi (Regsosek)



Strategi Peningkatan SDM Berkualitas

(Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,61)

1. Peningkatan layanan dasar

- ✓ Percepatan wajib belajar 13 tahun
- ✓ Penuntasan Tuberculosis
- ✓ Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
- ✓ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
- ✓ Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga Kesehatan

2. Peningkatan modal manusia

- ✓ Makan bergizi untuk siswa dan ibu hamil (89,9 juta orang 2029)
- ✓ Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- ✓ Revitalisasi Sarana dan Prasarana sekolah dan madrasah
- ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas

3. Peningkatan modal sosial budaya

- ✓ Pendidikan Karakter, Kewargaan, Agama dan Budaya
- ✓ Pendidikan keluarga dan pengasuhan



Kementerian PPN/
Bappenas



02.

Prioritas Nasional



PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia



Memperkokoh Ideologi Pancasila

Tantangan & Peluang

Tantangan:

1. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi yang masif;
2. Memudarnya etika sosial, moral, dan budaya;
3. Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme;
4. Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
5. Penerapan Pancasila di kalangan pejabat kian memburuk (sebanyak 45,8%);
6. Penerapan Pancasila di masyarakat masih buruk (sebanyak 30,3%);
7. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa.

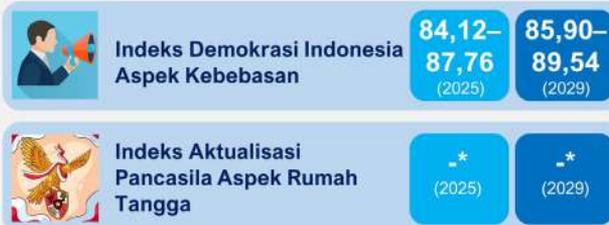
Peluang dan Faktor Pendorong:

1. Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa, dan keadilan sosial;
2. Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia.

Sasaran Utama

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Target:



Keterangan: –*) dalam proses perhitungan

Highlight Intervensi

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara

Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Lembaga Ketahanan Nasional; dan Kementerian Kebudayaan

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN

- Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara

Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Dalam Negeri; dan Lembaga Ketahanan Nasional

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN



Memperkokoh Demokrasi

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- **Media massa** hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan;
- **Penetrasi media konvensional di masyarakat jauh berkurang.** Tingkat penetrasi televisi selalu di atas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. Berbanding terbalik dengan media *online* yang sudah mencapai 70-an%, serta media sosial 62%;
- **Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi** (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi);
- **Catatan KPK** sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan **terdapat 22 Gubernur dan 148 bupati/walikota** yang **terjerat kasus korupsi**;
- Pada rentang 2021-2023, **ICW mencatat terdapat 61 kepala daerah** yang ditetapkan sebagai **tersangka kasus korupsi**;

Peluang:

- Mendorong koalisi antara Dewan Pers dan *civil society* untuk mewujudkan praktik demokrasi substantial;
- Optimalisasi & agresivitas organisasi pers;
- Sinergitas akademisi dan praktisi dalam pelaksanaan program pelatihan & inovasi bagi jurnalis/perusahaan pers;
- Nilai kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia bersumber dan berakar pada budaya bangsa.

Sasaran Utama

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Target:

	Indeks Kemerdekaan Pers	72,30 (2025)	76,30 (2029)
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76,00 (2025)	78,00 (2029)
	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	71,00 (2025)	75,00 (2029)
	Persentase Kader yang Menempati Jabatan Strategis	52 (2025)	59 (2029)

Highlight Intervensi

- Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)

Instansi Pelaksana: Kementerian Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN

- Peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah

Instansi Pelaksana: Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN



Memperkokoh Demokrasi

Tantangan & Peluang

- Terdapat 125 permohonan *judicial review* terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019-2024;
- Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023);
- Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Kesetaraan - Indikator Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mengalami penurunan menjadi 86,22 (2023);
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020).

Peluang:

- OMS menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan;
- Hubungan anggota legislatif dengan konstituen dapat dioptimalkan melalui platform artikulasi dan partisipasi digital;
- Masyarakat sipil menjadi *counterbalance* dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi.

Sasaran Utama

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Target:



Indeks Demokrasi
Indonesia

81,69–
85,23
(2025)

83,42–
86,96
(2029)



Indeks Demokrasi
Indonesia Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi

79,46–
82,90
(2025)

81,14–
84,59
(2029)



Indeks Demokrasi
Indonesia Aspek
Kesetaraan

81,55–
85,08
(2025)

83,28–
86,81
(2029)

Highlight Intervensi

- Penguatan fungsi legislasi dari lembaga legislatif

Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kementerian Dalam Negeri

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN

- Penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik

Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; KPU; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN



Hak Asasi Manusia

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- Masih ditemukan kebijakan yang dinilai **diskriminatif** berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (421 kebijakan);
- Sejak 2018-2023, Komnas HAM telah menerima **pengaduan dugaan pelanggaran HAM (29.542 pengaduan)**;
- Skor Indeks Akses terhadap Keadilan mengalami penurunan** pada tahun 2021 (53,6);
- Minimnya **Pendidikan HAM secara berkelanjutan** bagi penyelenggara negara dan non-penyelenggara negara.

Peluang:

- Berbagai inisiasi dilakukan, seperti **pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM**, perluasan pemahaman HAM kepada aktor negara maupun non-negara, serta adanya **pedoman penyusunan kebijakan dan regulasi yang memenuhi prinsip-prinsip HAM**;
- Upaya **penguatan layanan akses keadilan**, dengan adanya **UU perlindungan saksi dan korban dan UU TPKS**;
- Upaya pemerintah untuk **merevisi UU bantuan hukum** agar dapat melingkupi seluruh **kelompok rentan** dan meningkatkan jumlah organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah.

Sasaran Utama

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Target:



Indeks Hak Asasi Manusia

2,75
(2025)

2,85
(2029)



Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2,85
(2025)

2,95
(2029)



Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik

2,65
(2025)

2,75
(2029)



Indeks Akses terhadap Keadilan

56,8
(2025)

59,8
(2029)

Highlight Intervensi

- Transformasi pengarusutamaan HAM

Instansi Pelaksana: Kementerian Hak Asasi Manusia RI

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN





Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029

Regulasi



Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila



PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Tantangan & Peluang

- **Dinamika geopolitik global** dan adanya potensi eskalasi ketegangan di Kawasan
- Masih adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia
- **Perkembangan teknologi** yang meningkat eksponensial serta tingginya trafik anomali yang berpotensi mengancam aktivitas ruang siber Indonesia
- **Ancaman pada wilayah ALKI** yang menjadi jalur strategis perairan
- **Keamanan Nasional** belum mampu menjadi landasan transformasi yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan

Sasaran Utama

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

Target:

	Asia Power Index (Military Capability)	16 (2025)	20 (2029)
	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	61.54* (2025)	66.88* (2029)
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5 (2025)	68,5 (2029)
	Global Cybersecurity Index	94,92 (2025)	95,08 (2029)
	Indeks Keamanan Laut Nasional	60 (2025)	64 (2029)

*) perhitungan sementara

Highlight Intervensi

- **Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan**

Instansi Pelaksana: Kementerian Pertahanan (Pengampu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Kementerian BUMN

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

- **Postur Diplomasi Indonesia**

Instansi Pelaksana: Kementerian Luar Negeri

Indikasi Lokasi: Pusat & Perwakilan RI

Sumber Dana: APBN & Pembiayaan Alternatif



Swasembada Pangan

Tantangan & Peluang

1. Meningkatnya jumlah penduduk (1,1%/tahun)
2. Stagnasi produksi pangan (padi turun sekitar 1,1% pada 2019-2023)
3. Tingginya ketergantungan terhadap impor (impor beras 2023=3,1 juta ton)
4. Masih terdapatnya daerah rentan pangan (sekitar 16% kab/kota)
5. Meningkatnya dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, ombak tinggi, dan anomali iklim)
6. Terjadinya alih fungsi lahan (sekitar 800 ribu ha pada 2019-2024)
7. Penurunan kualitas/degradasi lahan (89,5% lahan tidak *sustainable*)
8. *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
9. Potensi lahan pangan di Luar Jawa (Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua)
10. Rendahnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan

Sasaran Utama

Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal

Target:

	Indeks Ketahanan Pangan	76,20* (2025)	80,72 (2029)
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	7,21% (2025)	4,41% (2029)
	Meningkatnya Produksi Pangan	Padi: 34,9 GKG (2025)	Padi: Tambahkan produksi 20 juta ton GKG (2025-2029)
	Berkurangnya Impor Pangan	(beras, jagung, kedelai, gula)	
	Nilai Tukar Petani	115-120	119-120
	Indeks Kesejahteraan Petani	68,3* (2025)	70,8 (2029)

*) perhitungan sementara

Highlight Intervensi

- Intervensi *ongoing* dan berlanjut: *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, Papua Selatan)
- Pengembangan lumbung pangan nasional, termasuk cetak sawah (tambahan luas panen 4 juta ha)
- Modernisasi, digitalisasi dan data pangan
- Subsidi pupuk, akses benih/pestisida, irigasi pertanian, alat mesin pertanian
- Pengembangan pangan lokal, pangan hewani, dan pangan akuatik
- Biofortifikasi dan fortifikasi pangan

Instansi pelaksana: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

Indikasi lokasi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, Papua Selatan

Sumber dana: Belanja K/L, DAK, PMN, Investasi



Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional

Merupakan Impelementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian

1. Luas intervensi indeks Pertanian (intensifikasi)
2. Luas cetak sawah (ekstensifikasi)

Keterangan: Target 2029 dalam proses perhitungan

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

1. Penyiapan Desain dan SID
2. Penyiapan Calon Lokasi dan Calon Petani Penerima
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi termasuk Sarana/Prasarana Pendukung
4. Penyiapan Lahan
5. Asuransi Pertanian
6. Alsin Pra Panen
7. Kawasan Padi
8. Pengendalian OPT dan DPI
9. Penyuluh Pertanian
10. Alsin Pasca Panen
11. Biaya Operasional Pasca Panen
12. Biaya Penyerapan Beras dan Perum Bulog

Instansi Utama

- Kementerian Pertanian
- Kementerian Pekerjaan Umum
- BUMN/Instansi yang ditunjuk lainnya

Instansi Pendukung

- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Pangan Nasional

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

1. Kalimantan Tengah
2. Sumatera Selatan
3. Nusa Tenggara Timur
4. Papua Selatan
5. Lokasi prioritas lainnya



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

APBN & BUMN

Swasembada Energi

Tantangan & Peluang

1. Ketergantungan terhadap energi fosil (86%);
2. Cadangan energi fosil terus menurun (minyak 2,5 miliar barrel, gas 1,4 TCM, batubara 31,7 ribu juta ton);
3. Impor BBM masih dominan (26 juta kL)
4. Subsidi energi semakin besar (Rp 159,6 triliun)
5. Akses energi belum merata (rumah tangga belum berlistrik mencapai 177rb RT);
6. Pemanfaatan EBT masih kecil (14%);
7. Penemuan Giant Discovery (12 lokasi)
8. Potensi EBT melimpah (3,600 GW)
9. Cadangan mineral sangat besar (cadangan bijih nikel 5,028M ton; bijih bauksit 3,135M ton; bijih tembaga 3,036M ton dan timah 6,927M ton).

Sasaran Utama

Meningkatnya **ketahanan energi** melalui peningkatan **pasokan energi**, perluasan **akses dan jangkauan**, serta pemanfaatan **energi bersih**

Target:

	Indeks Ketahanan Energi	6,77 (2025)	6,95 (2029)
	Pasokan Energi Primer	280 MTOE (2025)	356 MTOE (2029)
	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,545 TOE/kapita (2025)	0,798 TOE/kapita (2029)
	Porsi EBT dalam Bauran Energi	20% (2025)	23% (2029)
	Intensitas Energi Primer	133,1 SBM/Miliar Rupiah (2025)	130 SBM/Miliar Rupiah (2029)

Highlight Intervensi

- Peningkatan **Penyediaan Energi**
- Perluasan **Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi**
- Penguatan Implementasi **Transisi Energi**

Proyek Prioritas (PSN)

- Pengembangan Lapangan Abadi WK Masela
- Pengembangan Lapangan Andaman
- Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II dan Ruas Dumai – Sei Mangkei
- Pengembangan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
- Pengembangan Bioetanol (E10)
- Pengembangan Panas Bumi

Dukungan

- **Instansi Pelaksana:** KESDM, Kemenperin, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kementan, BRIN, Pemda, Pertamina, PLN, IPP
- **Indikasi sumber Pendanaan:** APBN, BUMN, Swasta, APBD



Swasembada Air

Tantangan & Peluang

Tantangan

- Kebutuhan Air yang terus meningkat
- Kapasitas Tampung per Kapita Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia
- Kapasitas *idle* SPAM dan NRW masih tinggi
- 80% dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik
- Terdapat hutan dan lahan kritis seluas 12,7 juta ha
- Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air
- Rendahnya kinerja BUMD Air Minum (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat)
- Hanya 25% kab/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik

Peluang

- Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya air terbesar di dunia
- Air dan sanitasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (UN A/RES/64/292)

Sasaran Utama

	Kapasitas Tampung Air Per Kapita	65.65 m ³ /kap (2025)	70 m ³ /kap (2029)
	Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan	28.2% (2025)	40,2% (2029)
	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman	33,0% (2025)	42,56% (2029)
	Menurunnya luas lahan kritis	250.000 ha (2025)	1.250.000 ha (2029)
	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman	12.5% (2025)	30% (2029)
	Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka	2.5% (2025)	0% (2029)

Highlight Intervensi

- **Pembangunan dan Pengelolaan Tampung Air**
Indikasi pendanaan: K/L = Rp434,06T; KPBU = Rp 24,81T
Instansi Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi Prioritas:
 - Lokasi potensial tampung air
 - Kawasan metropolitan, perkotaan, dan strategis
 - Kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan terpencil (3T)
- **Konservasi Sumber Daya Air**
Indikasi pendanaan: K/L = Rp 8,6 T pertahun
Instansi pelaksana: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Lokasi Prioritas: 108 DAS yang dipulihkan
- **Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**
Indikasi pendanaan: K/L = Rp 35,12 T
Instansi Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi Prioritas: Kab/Kota dengan capaian akses <20%, Kawasan WM dan non WM, Perdesaan di Wilayah 3T
- **Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS**
Indikasi pendanaan: K/L = Rp114T; DAK = Rp40T; APBD = 42T
Instansi Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi Prioritas:
 - Wilayah Metropolitan dan Ibukota Provinsi
 - Wilayah DAS Prioritas
 - *Challenging Areas* (Rawan Air, Pesisir, dan lain sebagainya)

Ekonomi Syariah

Tantangan & Peluang

Isu Tantangan

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar (**Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Index (GIEI) 2023/2024**)
- **Masih rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI** (baru mencapai sekitar 3,8% dari total impor produk halal negara-negara OKI)
- **Masih terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal** (baru sekitar 0,2% dari total UMKM pada tahun 2022)
- **Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia** (size aset keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi ke-7 global, dan market share terhadap keuangan nasional baru sekitar 12% pada tahun 2023).
- Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dengan database yang belum terintegrasi.

Peluang

- Pengeluaran konsumen muslim global diproyeksikan mencapai US\$3,1 triliun pada tahun 2027.
- 98% penduduk muslim Indonesia menganggap agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari (Survey Pew Research Center 2024)
- Peningkatan **awareness terkait halal lifestyle** yang meningkatkan **demand** (global dan domestik) terkait produk halal dan produk keuangan syariah
- **Keselarasan nilai-nilai syariah dengan sustainable development and ethical consumerism**
- **Konektivitas digital** dan pertumbuhan **e-commerce**.

Sasaran Utama

Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi

Target:



Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)

Peringkat 3
(2025)

Peringkat 1
(2029)



Kontribusi PDB Syariah

-*
(2025)

-*
(2029)

Keterangan: *) dalam proses perhitungan

Highlight Intervensi

Penguatan Industri Halal

- **Instansi Pelaksana:** Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama
- **Indikasi Lokasi:** Pusat
- **Sumber Pendanaan:** APBN



Ekonomi Digital

Tantangan & Peluang

Tantangan

- Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal, dan tingkat maturitas digital yang masih terbatas
- Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing nasional
- Belum terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital

Peluang

- Di negara berpendapatan menengah, peningkatan 10 persen poin penetrasi broadband meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen (Worldbank, 2015)
- 10% peningkatan network coverage meningkatkan 0,92% pertumbuhan PDRB (CSIS, 2018)
- Adopsi teknologi 4.0 meningkatkan +10 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2030 (Making Indonesia 4.0, 2017)

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB

Target:



Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

8-9%
(2025)

12%
(2029)



Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)

43
(2025)

40
(2029)

Highlight Intervensi

- Startup Digital Terakselerasi
- Fasilitasi Digital Technopreneur
- Penyusunan regulasi TKDN Produk Software dan Konten
- Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional
- Peningkatan kapasitas sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) untuk pengendalian IMEI
- Penguatan Standardisasi Digital

Instansi Pelaksana : Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional

Lokasi : Nasional

Sumber Pendanaan: APBN



Ekonomi Hijau

Tantangan & Peluang

- Tiga krisis global yang terus meningkat: **Triple Planetary Crisis**, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif** yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem
- **Investasi yang dibutuhkan untuk bertransisi ke ekonomi hijau sangat besar.** Investasi untuk dekarbonisasi pada 2025-2060 mencapai Rp 794,6 Triliun per tahun
- **Transfer teknologi dan inovasi** untuk mempercepat implementasi ekonomi hijau yang didukung dengan pengembangan pembiayaan inovatif hijau, seperti *blended finance, impact investment, carbon tax*, dll
- **Persiapan migrasi ke green jobs.** Skenario Pembangunan Rendah Karbon akan menciptakan **15,3 juta pekerjaan hijau/green jobs** pada tahun 2045
- **Transisi dari Ekonomi Linear menuju Ekonomi Sirkular** yang diproyeksikan dapat meningkatkan PDB hingga kisaran Rp 638 Triliun pada tahun 2030

Sasaran Utama

Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Target:

	Indeks Ekonomi Hijau	70,8 (2025)	78,6 (2029)
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16 terdaur ulang) (2025)	38 (20 terdaur ulang) (2029)
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	36,65% (2025)	48,15% (2029)
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44 (2025)	0,55 (2029)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49 (2025)	77,20 (2029)
	Proporsi Tenaga Kerja Hijau	2,74% (2025)	3,11% (2029)
	Tingkat input material sirkular	9,2% (2025)	10% (2029)

Highlight Intervensi

- **Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan serta Efisiensi dan konservasi energi**
Instansi Pelaksana: Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
Lokasi: Nasional
- **Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs** serta **Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau**
Instansi Pelaksana: Kementerian Ketenagakerjaan
Lokasi: Nasional dan Daerah
- **Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan**
Instansi Pelaksana: Kemenhub, KESDM, Kemenperin
Lokasi: 10 Wil. Metropolitan dan 10 Kota Prioritas
- **Perubahan Perilaku dan Tata Kelola Persampahan**
Indikator: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Instansi Pelaksana: Kemen LH/BPLH, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kemendagri, Kemenkes, Pemda
Lokasi: Nasional
- **Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut**
Instansi Pelaksana: : Kemen LH/BPLH
Lokasi: 23 provinsi prioritas
- **Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau**
Instansi Pelaksana: : Kemen LH/BPLH, Kementerian PU
Lokasi: 13 DAS Prioritas (utama), dan nasional
- **Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular** (termasuk pengembangan pengelolaan bioplastik)
Instansi Pelaksana: Kemen LH/BPLH, Kemenperin, Kementan
Lokasi: daerah dan nasional
- **Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi**
Instansi Pelaksana: Kemen LH/BPLH, KKP, Kementan
Lokasi: daerah dan nasional

Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

Tantangan & Peluang

- **Kontribusi PDB Maritim baru mencapai 7,92%** (2022) sehingga masih dapat **dioptimalkan** melalui pengembangan 12 klaster.
- **Tata Kelola birokrasi, pengaturan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya kondusif** bagi pembangunan sektor ekonomi biru.
- **Luas kawasan konservasi perairan** telah mencapai 29,2 Juta Ha (2023) tapi **belum semuanya dikelola secara efektif** (rata-rata nilai efektivitas 49,56 - dikelola minimum).
- **Pertumbuhan PDB perikanan mengalami stagnasi** (5,2-5,5%) sejak 2015, sementara **potensi perikanan masih dapat ditingkatkan**.
- **Produksi garam Indonesia (2,55 Juta Ton)** masih tertinggal jauh dari negara lain (**peringkat 20**), meskipun memiliki **garis pantai terpanjang kedua dunia**.
- Pangsa kapal Indonesia cukup besar di dunia (**10,7%**), namun **produktivitas galangan kapal** saat ini masih relatif **rendah (<500 DWT)**. Penguatan galangan kapal diperlukan untuk mendukung 40% jalur perdagangan maritim komersial dunia yang melewati 3 ALKI yang memiliki SLoC.
- **Pariwisata pesisir dan laut mewakili 50% total pariwisata global**, yang menyumbang sektor ekonomi bagi negara pesisir dan negara kepulauan
- Belum terintegrasinya **riset kemaritiman dengan dunia usaha** serta kualitas dan kapasitas **SDM maritim** yang masih perlu ditingkatkan.

Sasaran Utama

Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru



melalui peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, industri pengolahan kelautan dan perikanan, industri transportasi laut, dan pariwisata bahari

24,43 (2025)
Pilar Ekonomi IBEI

35,92 (2029)
Pilar Ekonomi IBEI

Perlindungan Kawasan Perairan



melalui peningkatan luas kawasan konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya

33,79 (2025)
Pilar Lingkungan IBEI

46,91 (2029)
Pilar Lingkungan IBEI

Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru



melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penguatan riset berbasis maritim, termasuk riset energi baru terbarukan yang bersumber dari perairan/laut

57,23 (2025)
Pilar Sosial IBEI

68,31 (2025)
Pilar Sosial IBEI

Highlight Intervensi

- **Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern dan Berkelanjutan: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Modern dan Armada Perikanan Tangkap di ZEE**
Instansi Pelaksana: KKP
Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Papua, dan Papua Selatan
- **Pengembangan Pangan Akuatik: Klaster Pangan Akuatik Unggulan dan Lumbung Pangan Desa: Ikan, Udang, Rumput Laut**
Instansi Pelaksana: KKP
Lokasi: **Sentra Udang** di NTB, Jabar, Jatim, Lampung, Sultra, Sulsel, Jateng, Aceh, dan Kalteng dan **Sentra Nila** di Jabar, Sulut, Sumut, Sumbar, Jateng, Bengkulu, Sumsel.
- **Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Laut dan Perairan**
Instansi Pelaksana: KKP dan Kemenperin
Lokasi: Jawa Timur (Garam Industri), Aceh, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Gorontalo (Garam Rakyat)
- **Penguatan Industri Transportasi Laut**
Instansi Pelaksana: Kemenperin dan Kemenhub
Lokasi: Kepri, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan

Rancangan Proyek Strategis

 <p>Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara</p>	<p>1 Penerapan Skema <i>Spending to Invest</i> Industri Pertahanan</p>		
 <p>Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan Swasembada Air</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Lumbung Pangan dan Energi Papua Selatan 2 Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu 3 Pengembangan Lapangan Abadi WK Masela 	<p>4 Pengembangan Lapangan Andaman</p>	<p>8 Pengembangan Panas Bumi</p>	<p>12 Agroforestri untuk Ketahanan Pangan dan Energi</p>
	<p>5 Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II dan Ruas Dumai – Sei Mangkei</p>	<p>9 Pengembangan dan Pengelolaan Tampungan Air</p>	<p>13 Ketahanan Pangan, Energi dan Air melalui Usaha Kelompok Tani Hutan</p>
	<p>6 Pengembangan Cadangan Penyanga Energi (CPE)</p>	<p>10 Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi</p>	<p>14 Pengembangan Kluster Pangan Akuatik Unggulan</p>
	<p>7 Pengembangan Bioetanol (E10)</p>	<p>11 Penyelamatan Mata Air Kritis</p>	<p>15 Pengembangan Lumbung Pangan Desa: Ikan, Udang, Rumput Laut</p>
 <p>Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Sampah, dan Penataan TPA/LUR 2 Infrastruktur Pengendalian Pencemaran Air 	<p>3 Pemulihan Ekosistem Gambut dengan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut</p>	<p>6 Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Laut dan Perairan</p>	
	<p>4 Konservasi & Mengembangkan Spesies Terancam Punah</p>	<p>7 Pengembangan Industri Transportasi Laut</p>	
	<p>5 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Modern dan Armada Perikanan Tangkap di ZEE</p>	<p>8 Penguatan Sistem Monitoring Gas Rumah Kaca yang terintegrasi</p> <p>9 Peningkatan Kualitas Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang berketahanan iklim</p>	



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029





PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Infrastruktur Berkelanjutan

Isu/Tantangan & Peluang

- **Waktu tempuh pada lintas utama di Indonesia masih tinggi** dibandingkan negara tetangga (Indonesia : 2,2 Jam/100 Km, contoh : rata rata Vietnam dan Thailand telah mencapai 1,5 Jam/100 Km)
- **Skala ekonomi angkutan kapal belum efisien** (Rata-rata ukuran kapal Indonesia hanya 1.168 TEUs, di bawah ukuran ideal 2.500 TEUs.)
- **Performa logistik Indonesia masih belum optimal.** Kinerja logistik Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya (Komponen infrastruktur transportasi masih terbatas (skor Indonesia 2,9 vs Vietnam 3,2 dan Thailand 3,7)

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Target:



Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)

46,5*
(2025)

48,5*
(2029)



Waktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)

2,10
(2025)

1,70
(2029)



Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)

66
(2025)

153
(2029)



On Time Performance Udara (%)

80
(2025)

85
(2029)

Keterangan: *) Angka sementara.

Intervensi Utama

- **Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah 3TP**

Instansi Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN, APBD/DAK (Dana Transfer), Badan Usaha

- **Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu**

Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN, APBD/DAK, Badan Usaha

- **Pengembangan Jaringan Bandar Udara Terpadu**

Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan, Badan Usaha
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN, Badan Usaha



Infrastruktur Berkelanjutan

Tantangan & Peluang

- Waktu tempuh pada lintas utama di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara tetangga (Indonesia : 2,2 Jam/100 Km, contoh : rata rata Vietnam dan Thailand telah mencapai 1,5 Jam/100 Km)
- Biaya logistik tahun 2022 mencapai 14,1% terhadap PDB (Target 2045 sebesar 8%) 80% biaya logistik disumbang oleh sektor transportasi. Transportasi darat (termasuk kereta api) berkontribusi tertinggi (50%)
- Share angkutan logistik kereta api relatif masih rendah (Pangsa kereta api logistik masih di bawah 1%)
- Sistem angkutan massal perkotaan modern yang masih tertinggal

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Target:



Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)

65

(2025)

73

(2029)



Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)

94

(2025)

98

(2029)



Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)

730

(2025)

780

(2029)

Intervensi Utama

- Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Instansi Pelaksana: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN, APBD/DAK, Badan Usaha

- Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang

Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan, Swasta, BUMN, Pemerintah Daerah

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN, Badan Usaha

- Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan

Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN, APBD/DAK, Badan Usaha

Infrastruktur Berkelanjutan

Tantangan & Peluang

- **Coverage dan usage gap fixed broadband yang tinggi.** Hingga TW IV 2023, 53,01% wilayah Indonesia dan 97,44% pemukiman telah terjangkau sinyal 4G, sementara cakupan 5G mencapai 0,15% wilayah dan 3,73% pemukiman, serta 68,49% kecamatan telah memiliki *Optical Distribution Point (ODP)*
- **Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah se-ASEAN.** Indonesia 62% di bawah rata-rata ASEAN 70%
- **Link and match kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri**
- **Kurangnya regulasi dalam menghadapi risiko global terkait teknologi,** termasuk kekurangan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur inovasi digital dan dampaknya (*Global Risk Report 2023*)
- **Tata kelola ruang digital Indonesia belum kondusif** dan belum *fair playing field* bagi industri

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Target:



Indeks Pembangunan TIK Nasional

6,10
(2025)

6,30
(2029)

Intervensi Utama

- **Pengembangan Superplatform Digital dan Peningkatan Ruang Digital Kondusif**

Instansi Pelaksana: Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: K/L/D, Swasta, dan BUMN



Infrastruktur Berkelanjutan

Tantangan & Peluang

- Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh penggunaan energi fosil (Bauran energi listrik 13,09%)
- Belum meratanya penyediaan dan kualitas layanan ketenagalistrikan (Rasio elektrifikasi 99,83% dan SAIDI/SAIFI 5,64 Jam/Pelanggan/Tahun / 4,27 Kali/Pelanggan/Tahun)
- Produktivitas pemanfaatan listrik masih relatif terbatas yang ditandai dengan Laju Pertumbuhan PDB Listrik 1,97%
- Masih adanya ketergantungan terhadap pembiayaan dan teknologi dari luar negeri serta besarnya alokasi subsidi dan kompensasi ketenagalistrikan (subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp 70,49 Triliun)

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Target:



Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

1.464
(2025)

1.713-2.000
(2029)

Intervensi Utama

- **Akselerasi Listrik Terbarukan Terintegrasi dan Bernilai Tambah**
Instansi Pelaksana: Kementerian ESDM (Pengampu), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, BRIN, Pemerintah Daerah, BUMN (PT. PLN), Swasta
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: K/L, BUMN, Swasta, Pinjaman
- **Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan Beban Dasar dan Variabel**
Instansi Pelaksana: Kementerian ESDM (Pengampu), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, PT. PLN
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: K/L, BUMN, Swasta, Pinjaman
- **Peningkatan Konektivitas Ketenagalistrikan dan Digitalisasi**
Instansi Pelaksana: Kementerian ESDM (Pengampu), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, BSSN, BRIN, PT. PLN
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: K/L, BUMN, Swasta, Pinjaman

Pendalaman Sektor Keuangan

Tantangan & Peluang

- Rendahnya pendalaman sektor keuangan, terutama pada sektor keuangan nonbank
- Belum optimalnya fungsi intermediasi (penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan belum optimal disalurkan kepada sektor prioritas)
- Rendahnya penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta terbatasnya diversifikasi produk
- Terbatasnya basis investor dan instrumen investasi pada pasar modal
- Rendahnya literasi dan tingginya gap antara inklusi dan literasi keuangan.

Sasaran Utama

Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

Target:

	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	146,8 (2025)	183,6 (2029)
	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9 (2025)	84,4 (2029)
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0 (2025)	11,2 (2029)
	Aset Asuransi/PDB (%)	9,1 (2025)	10,5 (2029)
	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8 (2025)	71,6 (2029)
	Total Kredit/PDB (%)	37,8 (2025)	46,8 (2029)
	Inklusi Keuangan (%)	91,0 (2025)	93,3 (2029)

Intervensi Utama

- Penguatan Peran Perbankan

Instansi Pelaksana: Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN

Indikasi Lokasi: Pusat



Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Isu/Tantangan & Peluang

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- Terbatasnya amenities, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Sasaran Utama

Meningkatnya nilai tambah pariwisata

Target:



Rasio PDB
Pariwisata (%)

4,60
(2025)

5,00
(2029)



Devisa
Pariwisata (Miliar
USD)

22,10 -
25,22
(2025)

32,00 -
39,44
(2029)

Intervensi Utama

- Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur as The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination, Yogyakarta dan Prambanan
- Penguatan Destinasi Regeneratif Bali
- Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau
- Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena

Instansi pelaksana: Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, BUMN, Swasta

Indikasi lokasi: Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, DK Jakarta, NTB

Sumber dana: Belanja K/L, DAK, KPBU, BUMN/Swasta

Produktivitas UMKM dan Koperasi

Tantangan & Peluang

- Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak
- Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian
- Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM
- Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri
- Belum optimalnya ekosistem usaha dalam mendukung pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM

Sasaran Utama

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas



Proporsi
Penciptaan
Lapangan Kerja
Formal (%)

41,33
(2025)

44,48
(2029)



Rasio Volume
Usaha Koperasi
terhadap PDB
(%)

1,10
(2025)

1,20
(2029)



Proporsi
Jumlah Usaha
Kecil dan
Menengah (%)

1,44
(2025)

1,60
(2029)



Rasio
Kewirausahaan
(%)

3,14
(2025)

3,56
(2029)

Intervensi Utama

Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

Instansi Pelaksana: Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Indikasi Lokasi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua

Sumber Dana: APBN, LPDB



Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Tantangan & Peluang

- **Ekosistem Kekayaan Intelektual yang belum optimal** terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual
- **Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas** berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah
- **Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal** terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- **Daya saing SDM Ekonomi Kreatif yang rendah** khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- **Rantai Pasok Ekonomi Kreatif yang belum optimal** mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekraf di daerah

Sasaran Utama

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB

Target:



**Proporsi PDB
Ekonomi Kreatif
(%)**

7,92
(2025)

8,37
(2029)

Intervensi Utama

Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

Instansi Pelaksana : Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Indikasi Lokasi : DK Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan

Sumber dana: Belanja K/L, DAK, KPBU, BUMN/Swasta



Rancangan Proyek Strategis

Infrastruktur Berkelanjutan

• Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah 3TP

1. Jalan Tol Serang – Panimbang
2. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera
3. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera
4. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera
5. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera
6. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera
7. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera
8. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera
9. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera
10. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung
11. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
12. Jalan Tol Serpong - Balaraja
13. Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
14. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
15. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
16. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta

1. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
2. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)
3. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar
4. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan
5. Jalan Tol Semarang - Demak
6. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen
7. Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri
8. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)
9. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo
10. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)
11. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)
12. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
13. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka – Mengwi
14. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA)

Rancangan Proyek Strategis

Infrastruktur Berkelanjutan



Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA

1. *Double Track* Jawa Selatan
2. Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur



Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu

1. Pembangunan Pelabuhan Patimban
2. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung



Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan

1. Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome – Manggarai
2. Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)
3. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I



Pengembangan Superplatform Digital dan Peningkatan Ruang Digital Konduktivitas

1. Pusat Data Nasional (Pemerintah)
2. AI Green Data Center Kayan (BUMN/Swasta)
3. AI Green Data Center Mamberamo (BUMN/Swasta)



Peningkatan Konektivitas Ketenagalistrikan dan Digitalisasi

1. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029





PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pendidikan

Tantangan & Peluang

- Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD (APK: 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK: 86,34%); sementara tingkat Penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (66,79%)
- Kualitas pendidikan masih rendah (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53)
- Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1% siswa mengalami bullying

Sasaran Utama

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Target:



Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)

9,33
(2025)

9,82
(2029)



Harapan lama sekolah (tahun)

13,32
(2025)

13,58
(2029)



Rata-rata nilai PISA
a. Membaca
b. Matematika
c. Sains

a. 396
b. 404
c. 416
(2025)

a. 409
b. 416
c. 426
(2029)



Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:
a. Literasi Membaca
b. Numerasi

a. 62,89
b. 54,36
(2025)

a. 66,89
b. 59,86
(2029)

Highlight Intervensi

- Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
Instansi Pelaksana: Kemendik dasar dan menengah dan Kemenag
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: belanja K/L dan DAK non Fisik
- Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Instansi Pelaksana: Kemendik dasar dan menengah, Kemenag, KemenPPPA, Kemensos, Kemenkum, Kemenham, Kemen Imigrasi dan Pemasarakatan, KemenPPN/Bappenas, Kemendagri, KemendesPDT, Kemen Transmigrasi
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN
- Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge / PTCK*)
Instansi Pelaksana: Kemendik dasar dan menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemenag, Kemen komunikasi dan digital
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: belanja K/L dan DAK



Pendidikan

Tantangan & Peluang

- **Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah**, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%.
- **Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah** sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan PT (Diploma & S1/S2/S3) mencapai 9,39%.
 - 2,83% lulusan PT masih ada yang bekerja di bidang keahlian rendah
- **Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah** (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023)
- **Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih rendah** yang tercermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar human capital and research pada GII 2024

Sasaran Utama

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Target:

 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	33,94 (2025)	38,04 (2029)
 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,40 (2025)	10,79 (2029)
 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78 (2025)	67,66 (2029)
 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	92,38 (2025)	95,08 (2029)

Highlight Intervensi

- **Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru** e.g formasi, rekrutmen, pengangkatan dan & penempatan, mobilitas, pembinaan karir karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), kesejahteraan berbasis kinerja
Instansi Pelaksana: Kemendik dasar dan menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemenag, KemenPANRB
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN
- **Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi**
Instansi Pelaksana: Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemenag, Kemenkeu
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN



Kegiatan Prioritas Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

Peningkatan partisipasi pendidikan anak usia sekolah:

1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan
 - a. SD/MI/Sederajat mencapai 99,05(2029)
 - b. SMP/MTs/Sederajat mencapai 92,13 (2029)
 - c. SMA/SMK/MA/Sederajat mencapai 69,71 (2029)
2. Angka Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi
 - a. SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs/Sederajat mencapai 96,75 (2029)
 - b. SMP/MTs/Sederajat ke SMA/SMK/MA/Sederajat mencapai 91,86 (2029)
3. APK SMA/SMK/MA/Sederajat mencapai 87,68 (2029)
4. Persentase Anak Kelas 1 SD yang Pernah Mengikuti PAUD mencapai 68,87 (2029)
5. Persentase siswa dan santri yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis mencapai 18,75% (2029)

Sasaran dan Indikator

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. **Penyediaan Makanan Bergizi Gratis di Sekolah**
 - Peserta didik TK,SD,SMP,SMA/SMK, dan SLB yang menerima makan bergizi gratis
2. **Penyediaan Makanan Bergizi Gratis di Madrasah dan Pesantren**
 - Peserta didik RA/BA,MI, MTS, MA, dan santri yang menerima makan bergizi gratis
3. **Edukasi Gizi dan PHBS**
 - Jumlah Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
 - Jumlah PAUD,SD,SMP,SMA, SMK, Lembaga Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS
 - Jumlah Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M
 - Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pendampingan Program UKS



K/L: Rp 71 T*

(*indikasi alokasi 2025, sudah termasuk untuk makan bergizi gratis di sekolah & santri serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita)

Institusi Pengampu
Badan Gizi Nasional

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh kab/kota di seluruh provinsi

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Kegiatan Prioritas Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Membangun Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sekolah

Terselenggaranya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah

Persentase satuan pendidikan yang direvitalisasi sesuai SNP Sarpras (KP) mencapai 50,00% pada tahun 2029

- Jumlah prasarana sekolah dan madrasah (negeri/swasta) yang direvitalisasi pada tahun 2025 sebanyak 11.420 satuan pendidikan dan kumulatif sampai dengan tahun 2029 sebanyak 94.557 satuan pendidikan

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Agama
- Pemerintah Daerah



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029



Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Membangun Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sekolah

Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul

1. Jumlah unit Sekolah Unggul yang dibangun (20 unit Sekolah Unggul baru)
2. Persentase lulusan sekolah unggul yang diterima di *top 100 world universities* mencapai 50% (2029)

Institusi Pengampu

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Kesehatan

Tantangan & Peluang

- **Angka Kematian Ibu** masih tinggi (189/100.000)
- **Stunting** masih tinggi (21,50 persen)
- **Prevalensi obesitas** terus meningkat (23,4 persen);
- **Wasting** masih tinggi (8,5%);
- **Kasus baru tuberkulosis** peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
- **Kasus baru kusta** peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 43,78 persen **puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes** sesuai standar
- Masih terdapat 20,36 persen **Rumah Sakit Umum Daerah kelas C** belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- **Rumah sakit terakreditasi paripurna** masih belum optimal (78,35 persen)
- **Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama** terakreditasi paripurna masih belum optimal (63,54 persen).

Sasaran Utama

Kesehatan untuk Semua

Target:

	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43 (2025)	75,4 (2029)
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,12 (2025)	2,10 (2029)
	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122 (2025)	85 (2029)
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8 (2025)	14,4 (2029)
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272 (2025)	190 (2029)
	Prevalensi obesitas >18 tahun	23,4 (2025)	23,4 (2029)
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98 (2025)	98 (2029)

Highlight Intervensi

- **Penurunan kematian ibu dan anak**
Instansi Pelaksana: Kemenkes, Kemendagri, KemenPPPA, Kemen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemenag, Pemda
Lokasi: 514 Kab/Kota, prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi (Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Papua, Papua Barat)
Sumber Dana : Belanja K/L, DAK, Subsidi, APBD (tbc)
- **Pencegahan dan penurunan stunting**
Instansi Pelaksana: Kemenkes, KemenPU, KemenPR, Kemensos, Kemendagri, KemendesPDT, Kemen Transmigrasi, Setwapres, KemenPPN/Bappenas, Kemenag, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemenkom dan digital, BPOM, BRIN, Bapanas, Kementan, Pemda, Jejaring SUN
Lokasi: seluruh kab/kota di seluruh provinsi
Sumber Dana : Belanja K/L, DAK fisik dan non fisik, APBD, dana desa
- **Eliminasi penyakit kusta**
Instansi Pelaksana: Kemenkes, Kemendagri, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemensos, Kemenkom dan digital, KemenPU, KemenPR, KemendesPDT, Kemen Transmigrasi, KemenPPN/Bappenas, BRIN
Lokasi: seluruh kab/kota di 38 Provinsi
Sumber Dana : Belanja K/L, DAK, dan subsidi
- **Investasi pelayanan kesehatan primer**
Instansi Pelaksana: Kemenkes, Kemenkeu, KemendesPDT, Kemen Transmigrasi, Kemendagri, KemenPU, KemenPR, Kemenhub, Kominfo-bakti, PLN, Pemda
Lokasi: 38 Provinsi dan 514 kab/kota
Sumber Dana : Belanja K/L, DAK, dan APBD

Kegiatan Prioritas Pemberian Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat MMemberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

Meningkatnya cakupan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi

1. Prevalensi stunting balita mencapai 14,4% 2029
2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi dan menghabiskan bantuan makanan bergizi 95% (2029)
3. Persentase ibu menyusui yang mengonsumsi dan menghabiskan bantuan makanan bergizi 95% (2029)
4. Persentase balita yang mengonsumsi dan menghabiskan bantuan makanan bergizi 95% (2029)
5. Persentase ibu hamil bermasalah gizi yang mengonsumsi dan menghabiskan makanan tambahan 95% (2029)
6. Persentase balita bermasalah gizi yang mengonsumsi dan menghabiskan makanan tambahan 95% (2029)
7. Skor literasi ibu hamil yang mendapatkan edukasi makanan bergizi seimbang sesuai standar 85 (2029)
8. Skor literasi ibu menyusui yang mendapatkan edukasi makanan bergizi seimbang sesuai standar 85 (2029)
9. Skor literasi pengasuh utama balita yang mendapatkan edukasi makanan bergizi seimbang sesuai standar 85 (2029)

Institusi Pengampu

1. Badan Gizi Nasional

Institusi Kontributor

1. Kemenkes
2. Bapanas
3. Kementan
4. Kemen Koperasi
5. KemenUKM
5. BPOM
6. Pemerintah Daerah

Sasaran dan Indikator

Indikasi *Highlight* Intervensi

Penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

1. Penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi
3. Pemantauan dan pengawasan terhadap kesesuaian standar gizi pada bantuan makanan bergizi dan makanan tambahan yang diberikan
4. Pelatihan pada tenaga pengolah makanan terkait standar pengolahan makanan
5. Pemantauan *compliance* (konsumsi) makanan bergizi yang telah diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, ibu hamil bermasalah gizi, dan ibu balita bermasalah gizi

Promosi dan Edukasi Gizi dan Pangan

1. Edukasi dan promosi gizi seimbang pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita,
2. Edukasi dan promosi gizi seimbang pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi

Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Makanan Bergizi

1. Sistem data rutin yang terintegrasi
2. Integrasi satuan pelayanan dengan sistem data rutin

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Makanan Bergizi

1. Standardisasi satuan pelayanan MBG
2. Standardisasi peralatan dan tenaga pengolahan makanan



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

Belanja K/L:
Rp. 355 T

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh kab/kota di seluruh provinsi (Program dilaksanakan secara terpilih di tingkat kecamatan di 514 kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029)

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Peningkatan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup

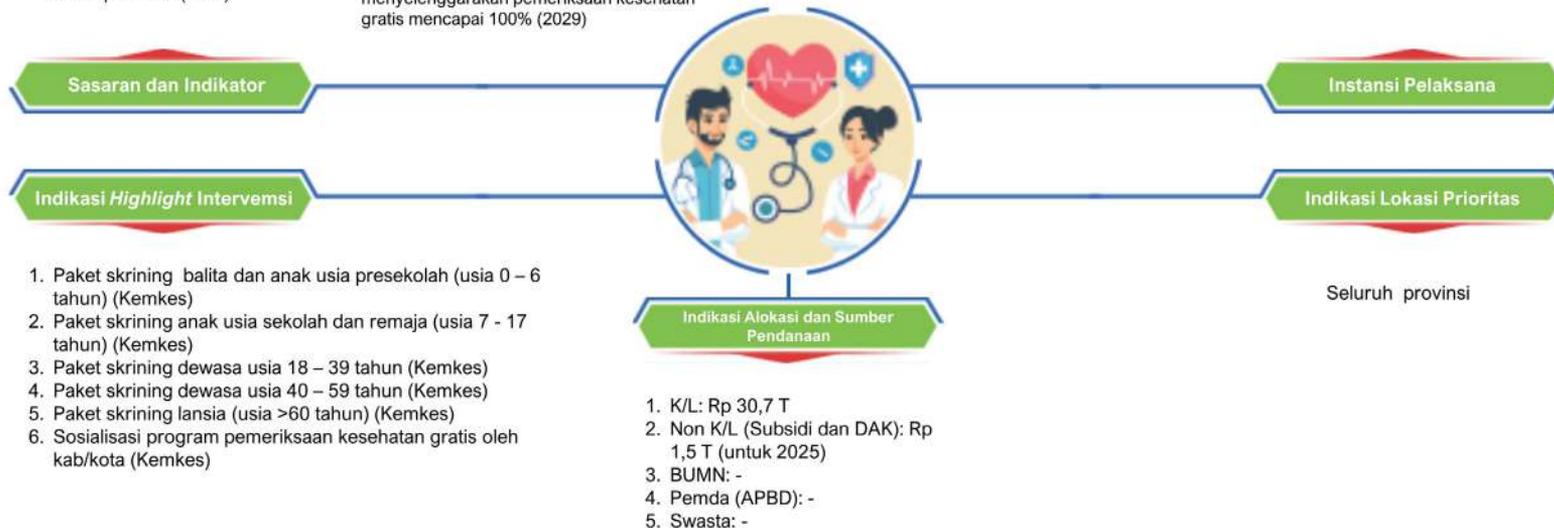
1. Cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) mencapai 100% (2029)
2. Persentase kelompok usia 0-6 tahun yang mendapat layanan PKG mencapai 100% (2029)
3. Persentase kelompok usia 7-17 tahun yang mendapat layanan PKG mencapai 100% (2029)
5. Persentase kelompok usia 18-39 tahun yang mendapat layanan PKG mencapai 100% (2029)
6. Persentase kelompok usia 40-59 tahun yang mendapat layanan PKG mencapai 100% (2029)
7. Persentase kelompok usia > 60 tahun yang mendapat layanan PKG mencapai 100% (2029)
8. Persentase puskesmas mampu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 100% (2029)

Institusi Pengampu

1. Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Pemda dan FKTP



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Kegiatan Prioritas Penuntasan TBC

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Menurunnya kasus tuberculosis di Indonesia

1. Insidensi Tuberkulosis sebanyak 190 orang per 100.000 penduduk pada 2029
2. Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC pada orang kontak serumah mencapai 90% pada tahun 2029
3. Cakupan penemuan kasus TBC di fasyankes 90% pada tahun 2029
4. Cakupan penemuan kasus TBC secara aktif (ACF) pada tahun 2029
5. Persentase kasus TBC yg dilaporkan (Notifikasi kasus TBC) mencapai 98% pada tahun 2029
6. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) mencapai 98% pada tahun 2029

institusi pengampu

Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

Kemendagri, Setkab, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemenag, Kemendik Dasar dan Menengah, Kemenaker, Kemenkum, Kemenham, Kemen Imigrasi dan Pemasarakatan, KemenBUMN, Kemensos, Kemen komunikasi dan digital, KemenPU, KemenPR, KemendesPDT, Kemen Transmigrasi, KemenPPN/Bappenas, BPOM, BRIN, BPJS Kesehatan, Pemda



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Kegiatan Prioritas Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Terbangunnya RS lengkap berkualitas di kab/kota dan meningkatnya kapasitas layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

- 1. Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 95% (2029)
- 2. Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu RS sebesar 75% (2029)
- 3. Persentase RS Kab/Kota yang memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar sebesar 100% (2029)
- 4. Persentase Provinsi dan Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 100% (2029)
- 5. Kab/Kota di Provinsi dengan wilayah berciri kepulauan dengan wilayah beroperasi RS kapal sesuai standar sebesar 60 Kab/Kota (2029)
- 6. Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C sebesar 67 Kab/Kota (2029)

Institusi Pengampu : Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah

Institusi Kontributor

- 1. Kementerian PPN/Bappenas
- 2. Kementerian Keuangan
- 3. Kementerian Dalam Negeri
- 4. BPKP
- 5. Bapeten
- 6. LKPP



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda

Tantangan & Peluang

- **Tingginya angka perceraian** di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024)
- **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** masih rendah (63,83)
- **18 dari 100 anak laki-laki/perempuan 13-17 thn** pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024)
- **Proporsi perempuan umur 20-24 tahun** yang menikah sebelum usia 18 menurun (6,92)
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** cenderung stagnan (91,85)
- **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** masih relatif rendah (0,447)
- **6,6% perempuan 15-64 th** pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan 12 bulan terakhir (SPHPN, 2024)
- **46,3% anak perempuan 15-49 th** mengalami P2GP (sunat Perempuan) (SPHPN, 2024)
- **Indeks Pembangunan Pemuda** belum optimal (60,59; 2023) dan **1 dari 4 pemuda di Indonesia NEET** (25,8%; Sakernas 2023)

Sasaran Utama

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Target:

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29 (2025)	71,30 (2029)
Indeks Perlindungan Anak	65,20 (2025)	66,62 (2029)
Indeks Pembangunan Pemuda	64,05 (2025)	70,94 (2029)
Indeks Ketimpangan Gender	0,424 (2025)	0,379 (2029)
Indeks Pembangunan Gender	92,15 (2025)	92,82 (2029)
Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94 (2025)	- *) (2029)
Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69 (2025)	- *) (2029)

Keterangan *): Masih dalam proses perhitungan

Highlight Intervensi

- **Penguatan institusi keluarga** untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak
Instansi Pelaksana: Kemen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, KemenPPPA, Kemenag, Kemensos
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN
- **Perlindungan anak** dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya
Instansi Pelaksana: KemenPPPA, dan Kemensos
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana : APBN
- **Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan**
Instansi Pelaksana: KemenPPPA, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kemendagri, Kemenkum, Kemenham, Kemen Imigrasi dan Pemasaryakatan , Polri, dan Kejaksaan RI.
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana : APBN
- **Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka dan pencegahan perilaku berisiko**
Instansi Pelaksana: Kemenpora, Kemen Kehutanan, Kemen LH/BPLH
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana : APBN



Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan & Peluang

- **Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah** (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB)
- **Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi masih rendah** (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2023 dengan pilar *knowledge and technology outputs* yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara)
- **Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola dengan baik ditandai** pengeluaran Iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,28% dari PDB
- **Potensi supply iptek dan inovasi besar** (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum diorkestrasi secara nasional dan dipertemukan secara optimal);

Sasaran Utama

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Target:

 Peringkat Indeks Inovasi Global	53 (2025)	49 (2029)
 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00 (2025)	4,00-4,71 (2029)
 Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30 (2025)	0,45 (2029)
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,3 (2025)	60,89 (2029)

Highlight Intervensi

- **Penguatan kapasitas iptek dan inovasi**
Instansi Pelaksana: Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, dan BRIN
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN
- **Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi**
Instansi Pelaksana: Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemenag, BRIN, pemda
Lokasi: Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan 5 Kota di luar Pulau Jawa
Sumber Dana : APBN



Olahraga

Tantangan & Peluang

- Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024)
- Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional saat tidak menjadi tuan rumah menurun signifikan (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023)
- Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%; 2023)
- Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk ≥10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit; 2021)
- Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk ≥10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah; 2021)
- Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang (86 orang cabor olimpiak sementara paralimpiak belum ada; 2023)

Sasaran Utama

Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

Target:

	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	- *) (2025)	4-6 (2028)
	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	- *) (2025)	4-6 (2028)
	Peringkat pada Asian Games	- *) (2025)	9-11 (2026)
	Peringkat pada Asian Para Games	- *) (2025)	5-7 (2026)
	Peringkat pada SEA Games	3 (2025)	2-4 (2027)
	Peringkat pada ASEAN Para Games	- *) (2025)	1-2 (2028)
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga (%)	10,36- 11,45 (2025)	12,13- 13,40 (2029)

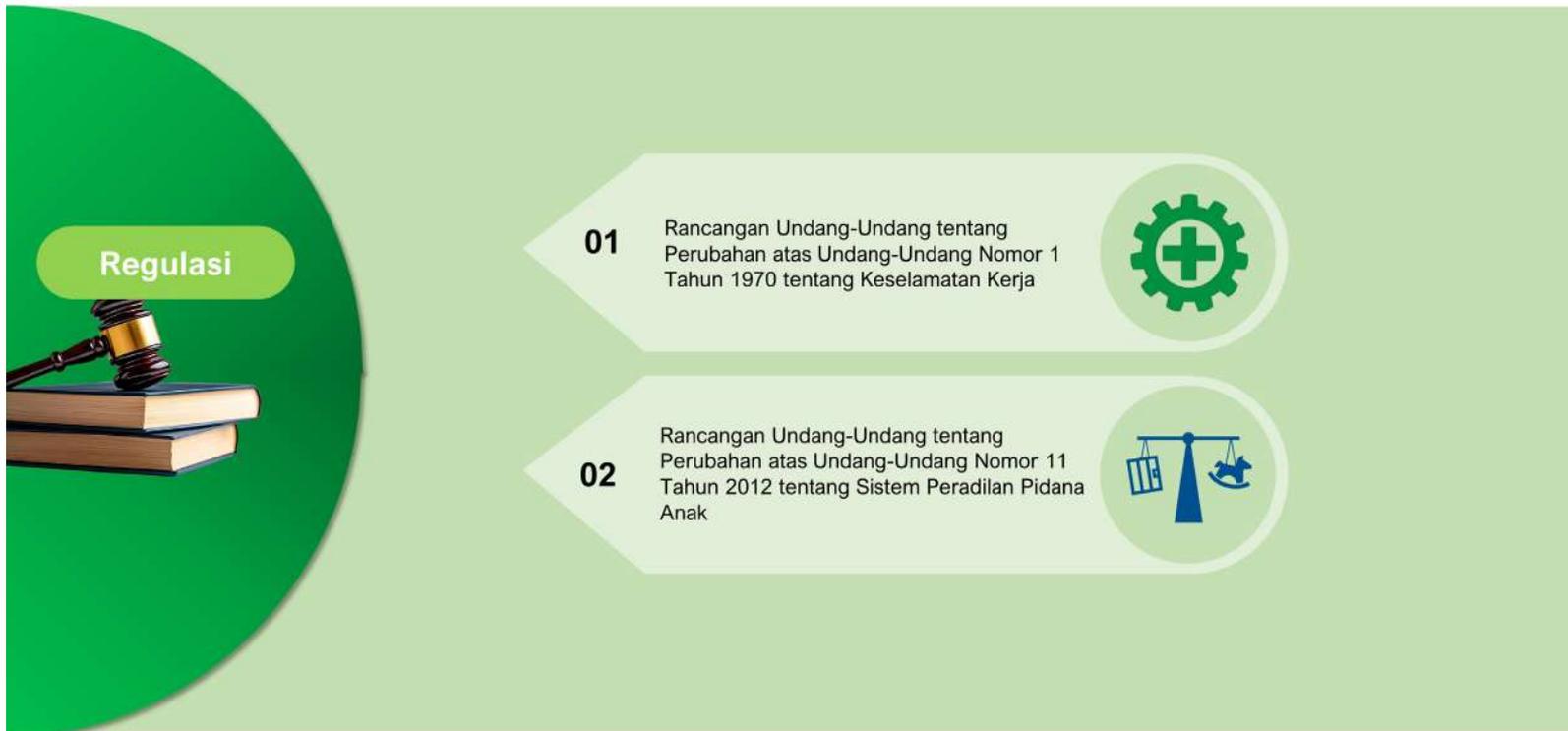
Keterangan *): Masih dalam proses perhitungan

Highlight Intervensi

- Pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul
Instansi Pelaksana: Kemenpora, KemenPU, KemenPR, Kemen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemenag, Kemendagri, Pemda
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN
- Pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional
Instansi Pelaksana: Kemenpora, KemenPU, KemenPR, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemenag, Kemendagri, Pemda
Lokasi: 38 Provinsi
Sumber Dana: APBN



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029





PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Hilirisasi dan Industrialisasi

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 20,99% (2015) menjadi 18,5% (2024)
- Peringkat **Competitive Industrial Performance Index Indonesia 5** tahun terakhir berada di bawah Vietnam, Thailand dan Malaysia
- **Economic Complexity Index Indonesia** peringkat ke-64, tahun 2021 nilainya -0,09
- **Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan signifikan** dalam 4 dekade terakhir.
- **88,7% Tenaga Kerja Indonesia** masih didominasi oleh *unskilled labor* dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi STEAM

Peluang:

- Cadangan bijih nikel terbesar ke-1 dunia 5,24 miliar ton
- Cadangan tembaga terbesar ke-7 dunia 20 juta ton
- Cadangan bauksit terbesar ke-4 dunia 3,13 miliar ton
- Produksi CPO terbesar ke-1 dunia 49,7 juta ton
- Produksi kelapa terbesar ke-2 dunia 2,87 juta ton
- Produksi rumput laut terbesar ke-2 dunia 9,2 juta ton
- Kontribusi PDRB industri pengolahan Sulawesi Tengah naik dari 5,87% di tahun 2014 menjadi 40,37% di tahun 2023 pasca beroperasinya **KI Morowali**
- Tahun 2025-2030, **68% penduduk Indonesia** berada di **usia produktif** yang dapat menjadi tenaga kerja terampil di sektor manufaktur.

Sasaran Utama

Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Target:

Rasio PDB Industri Pengolahan (% PDB)	20,8* (2025)	21,9* (2029)
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	5,53 - 6,18 (2025)	-** (2029)
Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per kapita (Rp Juta)	9.170,56 (2025)	-** (2029)
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)	48,06 (2025)	48,57 (2029)

Keterangan: * akan diupdate kembali sesuai putaran FPP

** data dalam proses penghitungan

Highlight Intervensi

- **Hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, bauksit, dan timah)**
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenperin, Kemen ESDM, Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kemen Hukum, Kemen HAM, Kemen Perdagangan, Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, BRIN.
Indikasi Lokasi: Maluku, Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku, NTB, Papua Tengah, Kalimantan, Kepulauan Riau, Sumatera, Babel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN
- **Pengembangan KI/KEK Prioritas**
Instansi Pelaksana: Kemen Perindustrian, Kemenko Ekon, Kemen Perhubungan, Kemen PU, Kemen PKP, Kemen ATR/BPN, Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Kemen UMKM.
Indikasi Lokasi: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK JIPE Gresik, KI Bintang Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, KI Ketapang, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI VDNIP Konawe, KI Stardust Estate Indonesia, KI IHIP Huabao, KI IMIP Morowali, KI IWIP Teluk Weda
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

Konektivitas *Backbone* dan Logistik

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- **Belum optimalnya *backbone* integrasi ekonomi dan sistem logistik nasional** terkait Infrastruktur terutama pada simpul utama (*backbone*) dan layanan konektivitas belum memadai.
- **Infrastruktur terutama pada simpul utama (*backbone*) dan layanan konektivitas belum memadai.**
- **Daya saing SDM dan pelaku usaha** dalam negeri **di bidang logistik** masih **perlu ditingkatkan**, salah satunya terkait pemanfaatan teknologi digital.

Peluang:

- **Kekuatan Maritim** sebagai **modal dasar**
- **Letak geografis strategis** menghubungkan Benua Asia-Australia dan Samudera Hindia-Pasifik
- **Kerja sama bilateral, regional, dan global** terkait penciptaan tata kelola maritim

Sasaran Utama

Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Target:

 Biaya Logistik (% PDB)	13,5 (2025)	12,5** (2029)
 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)	8,27 (2025)	7,56 (2029)

Keterangan: ** Kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian

Highlight Intervensi

- **Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik**
Instansi Pelaksana: Kemenhub, Kemen PU, Kemen PKP, dan Badan Pangan Nasional.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN
- **Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik**
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen Perdagangan, Kemen Kelautan dan Perikanan.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN
- **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik**
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen Perhubungan, Kemen Komunikasi dan Digital, Kemen BUMN.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN

Ekonomi Domestik dan Global

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- Keterbatasan infrastruktur dan akses pembiayaan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi
- Tarif maupun NTM serta kebijakan *green trade* dapat menghambat ekspor Indonesia serta daya saing industri dalam negeri
- Selama 20 tahun terakhir, kinerja ekspor barang Indonesia stagnan

Peluang:

- Indonesia memiliki 81 proyek investasi berkelanjutan dengan total nilai ~US\$15.9 bn, meliputi enam sektor prioritas dan berlokasi di seluruh Indonesia
- Potensi ekspor yang belum terealisasi:
 1. US\$ 11 Miliar untuk Produk *Palm Oil* (HS 151190)
 2. US\$ 6.4 Miliar untuk Produk *Ferro-Nickel* (HS 720260)
 3. US\$ 3.9 Miliar untuk Produk *Motor Vehicles* (HS 8703xx)
- Papua penghasil Tembaga terbesar, ekspor tembaga Papua tahun 2021 mencapai US\$ 4,3 Miliar
- NTB penghasil Mutiara terbesar, Ekspor mutiara NTB tahun 2021 mencapai US\$ 8,7 Juta

Sasaran Utama

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Target:

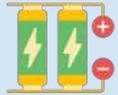
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2 (2025)	30,6-31,6* (2029)
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6 (2025)	25,1-28,0* (2029)
Nilai PMA dan PMDN (Rp.Triliun)	1.868,23 - 1.905,60 (2025)	2.741,25 - 3.643,64 (2029)
Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)	1,2 (2025)	1,43 (2029)
Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)	0,99 (2025)	1,20 (2029)

Keterangan: * akan diupdate kembali sesuai putaran FPP

Highlight Intervensi

- Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemen Koperasi, Kemen UMKM, BRIN, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta
- Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global
Instansi Pelaksana: Kemen Perdagangan, Badan Pangan Nasional.
Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN
- Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA
Instansi Pelaksana: Kemen Perdagangan, Kemen Perindustrian, Kemen Kelautan dan Perikanan.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN
- Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen Perdagangan, Kemen Perindustrian.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

Rancangan Proyek Strategis



Hilirisasi Nikel

Berbasis Industri: Industri Stainless Steel, Industri Katoda, Industri Battery Cell/Pack

Berbasis lokasi: KI IWIP, KI Pulau Obi, KI Buli, KI IMIP, KI Stardust, KI Huabao, KI Pomalaa, KI Konawe, KIT Batang*



Hilirisasi Tembaga

Berbasis lokasi: KI/KEK JIPE, KI Sumbawa Barat*



Hilirisasi Bauksit

Berbasis lokasi: KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI KIPI*



Hilirisasi Sawit

Berbasis Industri: : Produktivitas Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Industri Biofuel, Industri Oleokimia (Industri Suplemen Kapsul Vitamin A dan E alami berbasis minyak sawit), Dekarbonisasi dan sirkular ekonomi di industri sawit

Berbasis lokasi: KI/KEK Sei Mangkei, KI Wilmar*



Hilirisasi Rumput Laut



Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)



Industri Kimia

Berbasis Industri: Pembangunan mega proyek industri kimia dasar, Revitalisasi industri pupuk, Gasifikasi batubara, Dekarbonisasi industri kimia

Berbasis lokasi: KI KIEC, KI Seafer, KI/KEK JIPE, KI Sentra Lamongan, KI KIPI, KEK Arun, KI Fakfak*



Industri Farmasi dan Kosmetik

Berbasis Industri: Industri Bahan Baku Obat dan Kosmetik, Industri Obat Tradisional (Jamu), Branding Produk Kosmetik dan Farmasi Halal

Keterangan: *) Pembangunan KI/KEK sebagai PSN termasuk penyiapan infrastruktur luar kawasan dan simpul konektivitas

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029

Regulasi



RUU tentang Perubahan atas
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

RUU tentang Perubahan atas
UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian



PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Kemiskinan

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- Pengelolaan dan integrasi data belum optimal
- Belum optimalnya koordinasi dan pembagian kewenangan antar K/L dan pemerintah daerah
- Program perlindungan sosial yang belum komprehensif
- Program pemberdayaan yang belum terintegrasi
- Cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan
- Perlunya peningkatan kemandirian masyarakat

Peluang:

- Mengoptimalkan *blended financing*

Sasaran Utama

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Target

<p>Tingkat kemiskinan</p>	7,0 – 8,0 (2025)	4,5 – 5,0 (2029)
<p>Proporsi penduduk kelas menengah</p>	-* (2025)	-* (2029)
<p>Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal</p>	-* (2025)	-* (2029)
<p>Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	32,15 (2025)	43,92 (2029)

Keterangan: *) sedang dalam perhitungan

Highlight Intervensi

• Integrasi Data Sosial Ekonomi Penduduk

Instansi Pelaksana: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

• Kartu Usaha

Instansi Pelaksana: Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BSN, dan BPOM

Indikasi Lokasi: Seluruh provinsi di Indonesia

Sumber Dana: APBN

Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Meningkatnya cakupan penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi

1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial*
2. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan*

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN;
- Penerima Program Indonesia Pintar;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako.



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari beragam skema terutama belanja K/L dan APBD

1. K/L: Rp 785 Triliun
2. Non K/L (Subsidi dan DAK):
 - Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg Rp566,35 triliun.
 - Subsidi listrik sebesar Rp379,15 triliun

- Kemen Dalam Negeri
- Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kemen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kemen Pertanian
- Kemen Kesehatan
- Kemen Agama
- Kemen Sosial
- Kemen Lingkungan Hidup
- Kemen Kehutanan
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kemen Transmigrasi
- Kemen PPPA
- Kemen ESDM
- Badan Pangan Nasional
- BNPB

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Afirmatif

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif

- Proporsi penduduk miskin rentan berusaha atau bekerja sebanyak 1.800.000 pelaku usaha miskin/rentan setiap tahunnya*

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

- Peningkatan motivasi bekerja dan berwirausaha;
- Akses penguatan kapasitas kerja;
- Akses penguatan kewirausahaan afirmatif;
- Akses asset produktif;
- Graduasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif.



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

Belanja K/L: Rp 72,45 T

Institusi Pengampu

- Kementerian Koperasi
- Kementerian UMKM

Institusi Kontributor

- Kemen Keuangan
- Kemen ATR/BPN
- Kemen Lingkungan Hidup
- Kemen Kehutanan
- Kemen Kelautan dan Perikanan

- Kemen Dalam Negeri
- Kemen Sosial
- Kemen Ketenagakerjaan
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- Kemen Transmigrasi
- Kemen ESDM
- Kemen Pariwisata
- Kemen Ekonomi Kreatif

- Kemen PPPA
- Kemen Perindustrian
- Kemen BUMN

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Provinsi

Keterangan: *) target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN.



Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Produktif

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Meningkatnya daya saing usaha penerima kartu usaha produktif

- Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap*



Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Perumahan dan Permukiman

Tantangan & Peluang

Tantangan:

- **Intervensi** eksisting **belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat** terutama pekerja informal
- **Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR** berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
- **Belum optimalnya pengelolaan hunian terbangun** dan berdampak pada menurunnya kualitas bangunan
- **Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik** yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Sasaran Utama

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Target



Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

67,00
(2025)

74,00
(2029)

Highlight Intervensi

- **Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu**

Instansi Pelaksana: Kementerian PPN/Bappenas, Kemen Pekerjaan Umum, Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemen ATR/BPN, Pemda, Swasta (CSR), dan pihak lainnya (sesuai kebutuhan penanganan)

Indikasi Lokasi: kab/kota yang memiliki SK Kumuh serta data numerik dan spasial kumuh yang termutakhirkan (261 kab/kota), diprioritaskan pada permukiman kumuh di 10 wilayah metropolitan, wilayah sungai kewenangan pusat, menempati tanah milik pemerintah, dan wilayah strategis.

Sumber Dana: APBN; DAK; dan APBD.



Kegiatan Prioritas Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU:

1. Jumlah unit rumah baru yang terbangun*
2. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya*
3. Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU*

Institusi Pengampu

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat

Institusi Kontributor

- Kementerian Sosial
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kemen Transmigrasi
- SMF
- TAPER
- Pemerintah daerah penerima manfaat



Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu:

- Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)*
- Jumlah unit hunian vertikal yang dilayani bantuan PSU*

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

- Hunian Vertikal Pemerintah**
 - Rumah susun sewa (tower/block) ASN, MBR, Pekerja
 - Rumah susun PPKS
 - Revitalisasi Rusun
 - Public Service Obligation (PSO)
- Hunian Vertikal Badan Usaha**
 - Rumah Susun Milik
 - Apartemen Milik
 - Kredit Konstruksi Developer
- Hunian Vertikal Sewa**
 - Housing Voucher
 - Kredit Konstruksi Rental Landlord Non-MBR
- Skema Backyarding/Vertical Rental Expansion**

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

- K/L: Rp 261,5 T
- BUMN: Dalam perhitungan
- Pemda (APBD): Dalam perhitungan
- Swasta: Dalam perhitungan

Institusi Pengampu

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat

Institusi Kontributor

- Perumnas
- SMF
- TAPERA
- Pemerintah daerah penerima manfaat

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Kawasan Perkotaan:

- 10 Kawasan Metropolitan
- Perkotaan lainnya

Kegiatan Prioritas Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu:

Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)*

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

1. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota

- Peremajaan kawasan terpadu kota x
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kumuh
- Konsolidasi Tanah/ Konsolidasi Tanah Vertikal
- Penyediaan akses air minum
- Penyediaan akses sanitasi
- Penyediaan akses persampahan

2. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan

- Pemugaran permukiman kumuh
- Peremajaan permukiman kumuh
- Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kumuh
- Konsolidasi Tanah/ Konsolidasi Tanah Vertikal



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

- Rp 16,5 T [K/L]
- Rp 4,5 T [DAK]
- Dalam Perhitungan [APBD]

Institusi Pengampu

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat

Institusi Kontributor

- Kementerian Keuangan
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh sejumlah 77 ribu hektar dengan kriteria:

1. Prioritas Penanganan oleh Kementerian PUPR:

- Permukiman kumuh di 10 wilayah metropolitan;
- Permukiman kumuh berlokasi pada wilayah sungai kewenangan pusat;
- Permukiman kumuh berlokasi pada tanah milik pemerintah (K/L/BUMN);
- Permukiman kumuh pada wilayah strategis

2. Penanganan melalui DAK PPKT:

- Kumuh kewenangan Provinsi;
- Kumuh kewenangan Kab/Kota.

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Perdesaan

Tantangan & Peluang

- Angka kemiskinan perdesaan masih sebesar 12,22% di 2023 (BPS)
- Akses ke air minum layak dan sanitasi layak di perdesaan hanya mencapai 84,93% dan 76,98% (BPS, 2023)
- Akses layanan kesehatan dasar perdesaan hanya 75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 tahun (BPS, 2023)
- Rasio elektrifikasi di perdesaan sudah mencapai 99,85% (KESDM, 2024) namun belum mempertimbangkan kualitas infrastrukturnya
- Nilai ekonomi sektor pertanian di perdesaan masih rendah dan diproyeksikan mengalami penurunan produksi hingga 25% akibat dampak perubahan iklim di 2045.
- Jumlah tenaga kerja di sektor primer diproyeksikan akan terus menurun hingga kurang dari seperlima di 2045 (Sakernas, BPS).

Sasaran Utama

Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Target



Keterangan: *) sedang dalam perhitungan

Highlight Intervensi

- **Penguatan Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Perdesaan**

Instansi Pelaksana: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kemen UMKM, Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, BMKG, dan BNPB

Indikasi Lokasi: Seluruh 75.625 desa di Indonesia; dengan lokasi prioritas: 5.780 desa di 10 Wilayah Metropolitan, 254 desa di 23 pengampu Kawasan Perdesaan Prioritas, 54 desa terdampak di IKN, dan desa-desa dengan potensi ekonomi lokal.

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa

- **Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif**

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi

Indikasi Lokasi: Seluruh 75.625 desa di Indonesia

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, dan Dana Desa



Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Perdesaan

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta perluasan cakupan infrastruktur perdesaan terutama (air minum, sanitas, Listrik, dan komunikasi)

- Akses air minum layak perdesaan*
- Akses ke sanitasi layak perdesaan*
- Presentase desa dengan layanan listrik lebih dari 12 jam*
- Presentase desa dengan akses internet yang stabil*

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervensi

- Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
- Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman
- Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
- Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi
- OM Akses Internet & OM BTS 4G /Lastmile



Indikasi Alokasi dan Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan infrastruktur perdesaan berasal dari beragam skema terutama Belanja K/L, APBD, Dana Alokasi Khusus, hingga Dana Desa.

Institusi Pengampu:

- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kemen Transmigrasi

Institusi Kontributor

- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kemen Transmigrasi
- Kemen Dalam Negeri
- Kemen Transmigrasi
- Kemen Pekerjaan Umum dan KEMENTERIAN ESDM
- Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kemen Komunikasi dan Digital
- Kementerian Keuangan
- Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
- Pemerintah Desa

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Lokasi pilot pembangunan infrastruktur desa termasuk penyediaan/revitalisasi hunian diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Desa-desanya dalam delineasi Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra IKN;
2. Desa-desanya pada 10 Wilayah Metropolitan;
3. 23 Kawasan perdesaan prioritas dengan tematik berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang terpilih;
4. 42 Kabupaten Daerah tertinggal dan Sangat Tertinggal;
5. 45 kawasan transmigrasi; dan
6. 204 kecamatan perbatasan prioritas.

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Perkotaan

Tantangan & Peluang

- Setiap 1% pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4% PDB perkapita, angka yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan China dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019).
- Wilayah Metropolitan di Indonesia menyumbang hampir 44,13% terhadap PDB Indonesia (Bappenas, 2023).
- Proporsi PDRB 10 WM terhadap nasional menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ditargetkan tahun 2045 proporsi PDRB 10 WM dapat mencapai 55,96% terhadap PDB Nasional (Bappenas, 2023).
- Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan serta kurang dinamisnya kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan
- 75% kawasan perkotaan berada di daerah pesisir, rentan banjir dan kenaikan muka air laut (World Bank, 2021)
- Tahun 2020, 56,67% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan (BPS, 2021) dan diproyeksi tahun 2045 mencapai 72,9% (Hasil SUPAS 2015, BPS, 2018). Hal ini menyebabkan permukiman tumbuh dan cenderung meluas dan tersebar secara acak serta keluar dari kontrol (fenomena *urban sprawl*) (Hidajat, et al, 2013).
- Estimasi kerugian akibat kemacetan per tahun di tiap kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bekasi, Medan dan Makassar sebesar 65 Trilyun Rupiah (Bank Dunia, 2019).
- Pembangunan dan penyediaan infrastruktur di kawasan metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.

Sasaran Utama

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Target



Highlight Intervensi

Pembangunan Wilayah Metropolitan

Instansi Pelaksana: Kemen PU, Kemen PR, Kemen ATR, Kemendagri, Kemen Perhubungan, Kemen LH, Kemen Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Kemenaker, Kemen Pariwisata, Kemen Ekonomi Kreatif, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, Kemenkes, Kemen KP, BRGM, Kemenko Perekonomian, Kemen Koperasi, Kemen UMKM, Kemen Komunikasi dan Digital, Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemen Transmigrasi, Kemen Perindustrian, BPS, BUMN, dan Pemda

Indikasi Lokasi:

WM Medan (Kota Medan, Kab. Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo); **WM Palembang** (Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir); **WM Jakarta** (Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kab. Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang); **WM Bandung** (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang); **WM Semarang** (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Grobogan); **WM Surabaya** (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik); **WM Denpasar** (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan); **WM Banjarmasin** (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Tanah Laut, Kab. Barito Kuala, Kab. Banjar); **WM Makassar** (Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa); **WM Manado** (Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara).

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, dan Dana Alokasi Khusus



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029





PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi Politik

Isu/Tantangan & Peluang

- Biaya politik tinggi
- Pendanaan partai politik belum memadai
- Tata kelola partai politik belum memadai
- Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat

Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi

Target:



**Indeks
Integritas
Partai Politik**

52-57
(2025)

59-65
(2029)

Highlight Intervensi

- **Penguatan pendanaan dan tata kelola partai politik**

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah (Kesbangpol)

Indikasi Lokasi: Pusat dan 38 provinsi

Sumber Dana: APBN

- **Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilihan**

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu

Indikasi Lokasi: Pusat dan 38 provinsi

Sumber dana: APBN

Reformasi Hukum

Isu/Tantangan & Peluang

- Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan.
- Belum optimalnya proses penanganan perkara
- Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara

Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi

Target:



Highlight Intervensi

- Penguatan tata kelola regulasi
Instansi pelaksana: Kementerian Hukum
Indikasi lokasi: Pusat
Sumber dana: APBN
- Penguatan Budaya Hukum
Instansi pelaksana: Kementerian Hukum
Indikasi lokasi: Pusat
Sumber dana: APBN

Reformasi Birokrasi

Isu/Tantangan & Peluang

- Disparitas kesejahteraan ASN;
- **34%** dari total jumlah ASN berusia **50 tahun ke atas** (aging)
- Akses pelayanan publik belum memadai;
- Penerapan sistem merit belum optimal;
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif
- Meningkatnya rata-rata kasus **WNI bermasalah** di luar negeri sebesar **37,64%** (2019-2023)
- Belum optimalnya hubungan pusat- daerah
- Kesenjangan kapasitas pemda dari segi kelembagaan dan sumber daya manusia
- Belum efektifnya fondasi keuangan daerah

Sasaran Utama

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Target:



Indeks Pelayanan Publik

3,68
(2025)

3,80
(2029)



Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3,12
(2025)

4,00
(2029)



Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

93
(2025)

94
(2029)

Highlight Intervensi

- **Reformulasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan berbasis tipologi wilayah**
Instansi pelaksana: Kemendagri, Seluruh K/L pengampu urusan konkruen, K/L pendukung/koordinatif, Pemda, Akademisi, Swasta
Indikasi lokasi: Nasional
Sumber dana: APBN
- **Memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward**
Instansi pelaksana: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan
Indikasi lokasi: Nasional
Sumber dana: APBN dan APBD
- **Penguatan tata kelola OSS RBA**
Instansi pelaksana: Kementerian Investasi dan Hilirisasi; KKP; Kementerian LH; Kementerian Kehutanan; Kementerian ESDM; Kemen Perindustri; Kemendag; Kemenhub; Kemenkes; BPOM; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kemenpar; Kemen Ekraf; Kemenkeu; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kemenag; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; Polri; Kemennaker; Kementerian PU; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pertanian
Indikasi lokasi: Nasional
Sumber dana: APBN
- **Penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri**
Instansi pelaksana: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI

Kegiatan Prioritas Memperbaiki Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Terwujudnya kesejahteraan ASN yang layak dan kompetitif

1. Aspek Kesejahteraan Indeks Sistem Merit *)

*) Adanya pengalihan tugas penilai sistem merit dari KASN kepada BKN, sehingga target 2029 belum dapat diproyeksikan

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Keuangan



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Isu/Tantangan & Peluang

- Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai 90% dari tahun 2002 ke tahun 2023)

Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi

Target:



Highlight Intervensi

- Sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik*

*pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, perburuhan

Instansi pelaksana: KPK; BPKP; Bappenas; Kementerian Pertanian; Kementerian Desa dan PDT; Kementerian Transmigrasi; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Kehutanan; Kementerian ESDM; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian BUMN; LKPP; PPAK; Pemda; Stranas PK; CSO

Indikasi lokasi: Nasional

Sumber dana: APBN dan Hibah/Donor

Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Isu/Tantangan & Peluang

- Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar **1,73%** atau sekitar **3,33 juta jiwa**, angka relapse mencapai lebih dari **70%**, ditambah dengan munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Sasaran Utama

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Target:



Highlight Intervensi

- Memperkuat Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba

Instansi pelaksana: Badan Narkotika Nasional

Indikasi lokasi: Pusat

Sumber dana: APBN

Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan

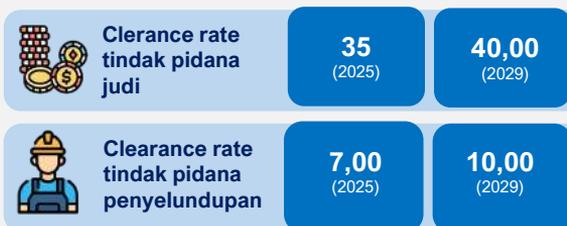
Isu/Tantangan & Peluang

- Pemain judi online di Indonesia sebanyak **4.000.000 orang** dengan **168 juta** transaksi judi online
- Perputaran dana mencapai **Rp 327 triliun** sepanjang tahun 2023.
- Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak **982 perkara** atau meningkat **837 perkara** dari 2022.

Sasaran Utama

Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan

Target:



Highlight Intervensi

- Menutup semua akses ke situs perjudian online
- Memperkuat Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Produktivitas BUMN

Isu/Tantangan & Peluang

- Rendahnya daya saing BUMN (Total Asset Turnover pada tahun 2022 sebesar **0,28 kali**; Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000 baru berjumlah **6 BUMN** pada tahun 2023)
- Belum efisiennya penugasan pemerintah kepada BUMN
- Rasio BUMN dengan kategori sehat masih perlu ditingkatkan (Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan **Kategori sehat 77,10%** pada tahun 2023)

Sasaran Utama

Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan

Target:



Return on Aset
(ROA) BUMN (%)

3,4
(2025)

3,9
(2029)

Highlight Intervensi

- **Peningkatan Daya Saing BUMN**

Instansi Pelaksana:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

- **Efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah**

Instansi Pelaksana:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

Optimalisasi Pendapatan Negara

Isu/Tantangan & Peluang

- Rendahnya penerimaan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (**administration gap**) maupun kebijakan (**policy gap**) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi penerimaan negara, yang selama lima tahun terakhir tercermin dari **rasio penerimaan perpajakan yang stagnan** pada tingkat 9-10 persen terhadap PDB.

Sasaran Utama

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi

Target:

 Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,36 (2025)	13,70-18,02 (2029)
 Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,24 (2025)	11,49-15,01 (2029)

Highlight Intervensi

- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

Instansi Pelaksana:
Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: Mengikuti arahan Presiden Terpilih

- Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Instansi Pelaksana:
Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: Mengikuti arahan Presiden Terpilih

Kegiatan Prioritas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak

- Persentase capaian basis pajak terhadap target yang ditetapkan sebesar 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029)
- Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target yang ditetapkan 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029)
- Tingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap perekonomian *)

*) Masih dalam proses penghitungan

KP Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan



Proyek Prioritas:

- Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi Inti Perpajakan (*core tax*)
- Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi *sin tax*
- Pembenahan Kelembagaan Perpajakan

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan berlaku untuk pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029



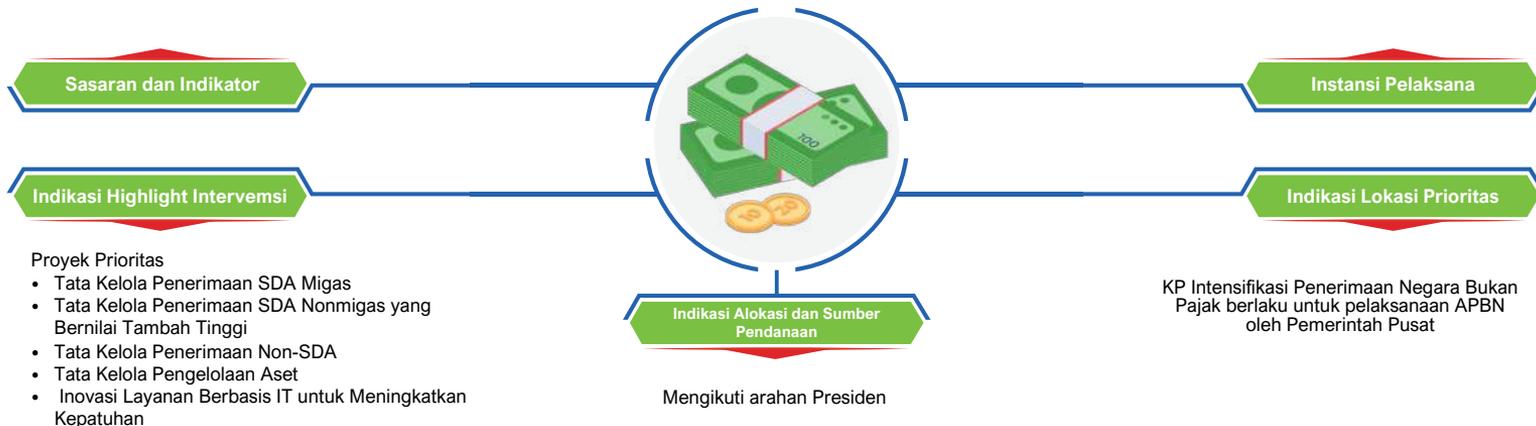
Kegiatan Prioritas Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Terciptanya dukungan PNBP yang optimal

- PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) sebesar 95 persen (2025) dan 100 persen (2029)

KP Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan



Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN 2025-2029

Pengendalian Inflasi

Isu/Tantangan & Peluang

- Fluktuasi inflasi dari sisi domestik banyak dipengaruhi oleh **fluktuasi komponen Inflasi Harga Bergejolak** yang secara historis tercermin dari realisasi tahun 2020-2023 secara berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia yang banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya multi-sektor (pasokan, teknologi manajemen pasca panen, infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data).

Sasaran Utama

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Target:



Tingkat
Inflasi (%)

2,5 ± 1,0
(2025)

2,5 ± 1,0
(2029)

Highlight Intervensi

- Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak

Instansi Pelaksana:
Badan Pangan Nasional

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029



Kelembagaan

Lembaga Tunggal pengelola regulasi

Transformasi Kelembagaan Penerimaan Negara



Regulasi

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RUU tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

RUU tentang Badan Usaha

RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional

Peraturan dan perundang-undangan untuk Transformasi dan Optimalisasi Penerimaan Negara



PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur



Keagamaan

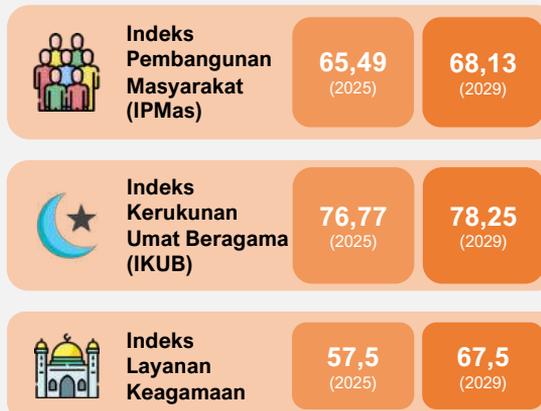
Isu/Tantangan & Peluang

1. **Pembangunan sosial kemasyarakatan** perlu menjadi perhatian (IPMas 62,85)
2. **Inklusifitas dalam kehidupan beragama dan berbudaya** (IKUB 76,02)
3. **Kebebasan beragama** belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang **inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan** (32 Kasus Gangguan Tempat Ibadah dan Peribadatan)
4. **Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan** yang membawa kebaikan bersama (*Maslahah al-Ammah, the Common Good, Bonum Commune*)

Sasaran Utama

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Target:



Highlight Intervensi

1. Penguatan **Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan**
Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan
Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi
Sumber Dana: APBN
2. Pengembangan **Dana Sosial Keagamaan Produktif**
Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, Baznas, BWI, Kementerian Keuangan
Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi
Sumber Dana: APBN & Dana Filantropi Keagamaan
3. **Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah** yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman
Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Kesehatan
Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi
Sumber Dana: APBN

Kebudayaan

Isu/Tantangan & Peluang

1. **Kearifan lokal** belum dipertimbangkan sebagai **modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat** (IPK 57,13)
2. **Karakter dan jatidiri bangsa** menghadapi ancaman budaya global
 - 36% siswa mengalami perundungan
 - Prevalensi penyalahgunaan narkoba: 3,3 juta jiwa
3. **Khazanah kearsipan nusantara** belum optimal
4. **Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas, dan inovasi** (Nilai Budaya Literasi 60,49)

Sasaran Utama

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Target:

	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	65,49 (2025)	68,13 (2029)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39 (2025)	60,70 (2029)
	Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas	58,44 (2025)	60,52 (2029)

Highlight Intervensi

1. Penguatan **Karakter dan Jati Diri Bangsa**

Instansi Pelaksana: Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; Kementerian Agama, BPIP

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN dan DAK

2. **Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya**

Instansi Pelaksana: Kementerian Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional RI

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

3. Pemanfaatan **Khazanah Budaya** dan Pengembangan **Kawasan Pemajuan Kebudayaan**

Instansi Pelaksana: Kementerian Kebudayaan

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

Pembangunan Berketahanan Iklim

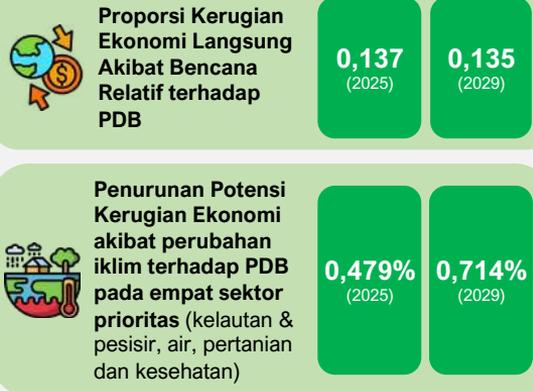
Isu/Tantangan & Peluang

1. **Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (0,419%)**
2. **Kenaikan muka air laut** yang terus meningkat (0,8–1,2 cm/Tahun)
3. **Pesisir rentan terpapar Perubahan Iklim** (313 dari 514 Kab/Kota)
4. **Perubahan curah hujan** berdampak pada siklus air dan ekosistem ($\pm 2,5$ mm/Hari)
5. **Gelombang ekstrem** terus meningkat (>1,5 M)

Sasaran Utama

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Target:



Highlight Intervensi

1. **Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut**

Instansi Pelaksana: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Indikasi Lokasi:

- Lokasi prioritas Kab/Kota Pesisir
- Lokasi prioritas Kab/Kota Laut
- Pantai kawasan 3T, Pantai utara Jawa
- Kawasan pesisir perkotaan, strategis ekonomi, dan berisiko abrasi tinggi

Sumber Dana: APBN

Pengelolaan Risiko Bencana

Isu/Tantangan & Peluang

1. Indeks Risiko Bencana Indonesia masih tinggi (132,5)
2. Peningkatan Sesar/Patahan Aktif (295)
3. Indeks Ketahanan Daerah masih rendah (0,44)
4. Desa di daerah rawan bencana (53.000 dari 81.616 desa)
5. Angka kematian akibat bencana meningkat (0,1 per 100 Ribu Jiwa)
6. Infrastruktur dasar berada di Zona Rentan Bencana (75%)
7. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat masih rendah (0,10)
8. Indeks pemulihan pascabencana masih rendah (6,02)

Sasaran Utama

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Target:



**Proporsi Kerugian
Ekonomi Langsung
Akibat Bencana
Relatif terhadap PDB**

0,137
(2025)

0,135
(2029)



**Penurunan Nilai
Indeks Risiko
Bencana**

1,2%
(2025)

1,2%
(2029)

Usulan Proyek Prioritas (PSN)



Penguatan Layanan Sektor Informasi dan Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Potensi Terdampak Gempa Megathrust

Highlight Intervensi

1. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana

Instansi Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

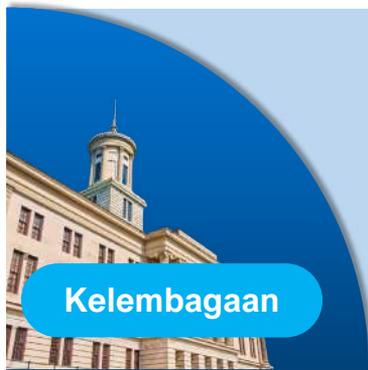
2. Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana

Instansi Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029



Kelembagaan

Memperkuat lembaga pengelola keuangan haji agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para calon jamaah haji



Regulasi

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Revisi Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Revisi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf



Kementerian PPN/
Bappenas

INDONESIA
EMAS
2015



03.

Arah Pembangunan Wilayah

Isu Strategis Kewilayahan

Ketimpangan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi (*share*) PDRB, Indeks Williamson, dan Tingkat Kemiskinan (%) dari tahun 2019 hingga 2024.

Tingkat Kemiskinan (%)



Angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun sempat meningkat akibat COVID-19.

Kontribusi PDRB



Kontribusi PDRB masih didominasi oleh Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Indeks Williamson



Terjadi penurunan angka ketimpangan wilayah yang diprediksi akan terus menurun hingga tahun 2029.

Sumber: BPS Indonesia, 2024; *Ket: tidak termasuk DOB

Isu dan Tantangan Pembangunan Perdesaan

Perekonomian dan Kemiskinan

- **93% sumber penghasilan utama** dari sektor primer.
- Kemandirian fiskal desa rendah, (**2% dari total APBDes bersumber dari PADes**)*
- **10% Desa yang sudah memiliki PADes**, 90%-nya berada di bawah angka **Rp. 100 Juta***
- **Tingkat kemiskinan sebesar 12,22%** (di atas tingkat kemiskinan nasional 9,36%)
- **Rasio gini perdesaan adalah 0,313** atau lebih merata dari perkotaan **0,409**.

**Berdasarkan desa yang melaporkan APBDes*

Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota

- Akses ke Air Minum layak dan sanitasi layak di perdesaan mencapai **84,93% dan 76,98%** (BPS, 2023)
- Akses layanan kesehatan dasar peredesaan **75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 tahun** (BPS, 2023)
- **Diperlukan penguatan relasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu dan berkelanjutan**

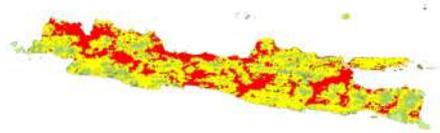
Isu dan Tantangan Pembangunan Perkotaan

Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional

- Setiap 1% pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4% PDB Perkapita, rendah jika dibandingkan dengan China (3%) dan negara Asia Timur & Pasifik (2,7%) (WDI, 2021).

Urban Sprawl

DoU Pulau Jawa 2045



*DoU menggunakan data penduduk desa/kelurahan tahun 2019, kabupaten/kota tahun 2010 dan 2020 yang dianalisis *Cellular Automata* untuk melihat persebaran penduduk.

Hasil proyeksi derajat urbanisasi (DoU)* Pulau Jawa pada tahun 2045 menunjukkan proses *sprawling* yang semakin massif, Menyebabkan lahan terbangun perkotaan semakin luas (Bappenas, 2022).

Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, dan Tata Kelola

- 14 Kota Besar memiliki kesenjangan investasi infrastruktur yang signifikan (World Bank, 2019).
- 75% kawasan perkotaan berada di daerah pesisir, rentan banjir dan kenaikan muka air laut (World Bank, 2021) dan 70% kota besar memiliki tingkat polusi udara melebihi ambang batas (World Bank, 2019).
- TPT sebesar 7,74% (BPS, 2022) dengan kemiskinan perkotaan tahun 2022 mencapai 7,52% (BPS, 2023).
- Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan serta keterbatasan pengelolaan kawasan aglomerasi/metropolitan (Bappenas, 2023).

Isu dan Tantangan Pembangunan IKN

Kesiapan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bappenas perlu mengawal pemindahan ASN ke IKN sebagai momentum penerapan **Smart Governance** dan transformasi **Tata Kelola Pemerintahan** menuju Indonesia Emas 2045



Akselerasi Investasi di Ibu Kota Nusantara

Perlu **sinergi kuat antara Bappenas dan stakeholders** untuk mendorong penyediaan infrastruktur prioritas di IKN melalui berbagai skema pendanaan alternatif.

Alokasi Anggaran Pembangunan IKN

20%
(~93,2 T)
APBN



Non-APBN
(KPBU, Swasta)
80% (~372,8 T)

Saat ini pendanaan Non-APBN terindikasi baru mencapai ~58,1 T (~12,5% dari alokasi Non-APBN)

Arah Pembangunan Wilayah Sumatera



Isu dan Potensi Wilayah Sumatera

Isu



Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50% dari PDRB (2023), yang nilai tambahnya yang masih relatif rendah dan relatif sensitif terhadap fluktuasi pasar global.
Diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20% dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak terjadi pada sektor ekstraktif dan industri hulu.
Infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi



Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/talent drain, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejuruan (70%) dan pendidikan tinggi (25%) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya brain/talent drain pada tenaga kerja ahli dan terampil (30%) (2023)
Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 30% (2023)



Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 14% (2023), dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 18%
Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas

Potensi Wilayah



Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektar dan menghasilkan 67% produksi sawit nasional
Komoditas perkebunan potensial lainnya: karet (70% produksi nasional), kopi (62% produksi nasional), tebu (36% produksi nasional), kelapa (32% produksi nasional)



Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27% dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 26% dalam produksi perikanan nasional.
Energi: Cadangan terbukti batubara mencapai 12,6 miliar ton, gas bumi 5,8 TSCF, dan minyak bumi 1.043 MBOE, dengan potensi clean energy berupa EBT Air (7,4 GW), EBT Panas Bumi (10 GW), EBT Floating PV (22 GW), EBT Bioenergi (28 GW)
Bahan Tambang: Terdapat resource logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan resource bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jarang (REE)



Geographical gift: dekat dengan main line dalam global maritime trade route, yaitu Selat Malaka, yang memberikan comparative advantage

Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

”Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”



Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Kawasan Perkotaan dan Koridor Industri

- 1 Pengembangan KPBPB Sabang dan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho
- 2 Pengembangan Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan dan layanan publik di Pesisir Barat-Selatan Aceh
- 6 Pengembangan kawasan perkotaan dan koridor industri rintisan Padang-Pariaman
- 9 Pengembangan koridor industri rintisan Bengkulu-Pulau Baai
- 10 Pengembangan koridor industri rintisan Muaraenim-Lahat
- 11 Pengembangan koridor industri prioritas Lhokseumawe-Aceh Utara dan KEK Arun
- 12 Pengembangan WM Medan, pengembangan koridor industri prioritas Medan-Kualatanjung-Seimangkei dan KEK Seimangkei,
- 15 Pengembangan kawasan perkotaan Batam, serta koridor industri prioritas KPBPB Batam-Bintan-Karimun dan KEK BAT, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batam
- 16 Pengembangan kawasan perkotaan dan koridor industri prioritas Pekanbaru-Dumai,
- 17 Pengembangan koridor industri rintisan Jambi
- 18 Koridor industri rintisan Pangkalpinang-Sungailiat
- 19 Pengembangan WM Palembang dan koridor industri rintisan Palembang-Tanjung Carat
- 20 Pengembangan kawasan perkotaan Bandar Lampung, koridor industri prioritas Bandar Lampung-Lampung Selatan

Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan

- 1 Pengembangan KSPN Weh dan KPPN Banda Aceh
- 4 Pengembangan Danau Toba dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata unggulan kelas dunia, pengembangan Dataran Tinggi Tapanuli & Karo sebagai KSPP
- 6 Pengembangan Dataran Tinggi Minangkabau sebagai kawasan pariwisata unggulan kelas dunia
- 17 kawasan pariwisata unggulan kelas dunia Candi Muarojambi
- 18 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan Belitung & industrialisasi perikanan di Tanjungpandan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Biru

- | | |
|---|--|
| 3 Industrialisasi perikanan di Sinabang | 16 Industrialisasi perikanan di Bagansiapiapi dan Tembilahan |
| 4 Industrialisasi perikanan di Sibolga-Pandan | 18 Industrialisasi perikanan di Tanjungpandan |
| 12 industrialisasi perikanan di Tanjungbalai-Asahan | 20 Industrialisasi perikanan di Labuhan Meringgai |
| 14 Industrialisasi perikanan di Natuna | |

Kawasan Afirmasi

- | | |
|--|--|
| 3 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Simeulue | 8 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Pulau Enggano |
| 5 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kep. Nias | 13 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kep. Meranti dan Kep. Lingga |
| 7 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kep. Mentawai | 14 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kep. Natuna & Kep. Anambas |

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Sabang-Jantho</p>	<p>a) Pengembangan KPBPB Sabang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan <i>globally connected</i>, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan dan pengelolaan Pelabuhan Sabang, baik untuk layanan logistik kargo maupun layanan kapal wisata • Pengembangan Sabang <i>Integrated Fishing Port & International Fish Market</i> • Pengembangan Sabang <i>Integrated Special Tourism Zone</i> • <i>Urban renewal</i> Kota Tua Sabang <p>b) Pengembangan kawasan pariwisata & ekonomi kreatif unggulan Banda Aceh-Sabang, yang meliputi KSPN Weh dan KPPN Banda Aceh</p> <p>c) Pembangunan Banda Aceh <i>Outer Ring Road</i></p> <p>d) Pembangunan Waduk Seulimum yang menyediakan air baku dan air minum untuk kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho</p> <p>e) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Banda Aceh</p> <p>f) Pembangunan jalan <i>missing link</i> Jantho-Keumala</p> <p>g) Penguatan Sabang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra</p>	<p>APBN, APBD, Dana Otsus Aceh, BUMN/Swasta/ KPBU</p>
<p>Kawasan Perkotaan Meulaboh</p>	<p>a) Pengembangan kawasan perkotaan Meulaboh pusat pertumbuhan dan layanan publik di Pesisir Barat-Selatan Aceh</p> <p>b) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Meulaboh</p> <p>c) Pembangunan terminal multipurpose Pelabuhan Meulaboh</p> <p>d) Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Meulaboh</p>	<p>APBN, APBD, Dana Otsus Aceh, BUMN</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Afirmasi Simeulue	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Peningkatan/preservasi jalan Lingkar Simeulue c) Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah d) Pemberdayaan aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan (perikanan dan perkebunan) 	APBN, APBD, Dana Otsus Aceh, Swasta
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A (<i>attractions, accesibilities, amenities, available packages, activities, ancillary services</i>) guna mewujudkan <i>quality & sustainable tourism</i>, termasuk melalui <i>urban renewal</i>, revitalisasi/pengembangan kawasan prioritas, serta pengembangan MICE economy b) Penyelesaian Lingkar Danau Toba dan Pembangunan Jalan Tol Parapat-Porsea-Balige 	APBN, APBD, Swasta, BUMN/KPBU
Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Pembangunan jaringan irigasi baru WS Nias c) Peningkatan/preservasi jalan Lingkar dan Trans Nias d) Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah e) Pemberdayaan aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan (perikanan dan perkebunan) f) Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Gunungsitoli 	APBN, APBD, BUMN/Swasta

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Dataran Tinggi Minangkabau dan Koridor Industri & Perkotaan Padang-Pariaman	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A (<i>attractions, accesibilities, amenities, available packages, activities, ancillary services</i>) guna mewujudkan <i>quality & sustainable tourism</i>, termasuk melalui <i>urban renewal</i>, revitalisasi/pengembangan kawasan prioritas, serta pengembangan MICE economy b) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung <i>high value economy & industry</i> c) Pengembangan BRT Padang-Pariaman d) Peningkatan layanan KA komuter Padang-Pariaman e) Reaktivasi layanan KA Padang-Padangpanjang-Solok-Sawahlunto 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Pembangunan jalan Trans Mentawai c) Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah d) Pemberdayaan aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan (perikanan dan perkebunan) e) Peningkatan kelas RS Umum Daerah Kep. Mentawai menjadi kelas C 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
Kawasan Afirmasi Pulau Enggano	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Pembangunan jalan Lingkar Enggano c) Penguatan Enggano sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas mata 	APBN, APBD

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Koridor Industri Rintisan Bengkulu-Pulau Baai	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung <i>high value economy & industry</i> b) Peningkatan Pelabuhan Pulau Baai c) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Pulau Baai 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
Koridor Industri Rintisan Muaraenim-Lahat	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung <i>high value economy & industry</i> b) Pembangunan jalan tol Prabumulih-Muaraenim c) Peningkatan jalur kereta api Prabumulih-Muaraenim-Lubuklinggau 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
Koridor Industri Prioritas Lhokseumawe-Aceh Utara	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung <i>high value economy & industry</i> b) Pembangunan jalan tol Lhokseumawe-Langsa c) Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Lhokseumawe 	APBN, APBD, BUMN/Swasta

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Koridor Industri Prioritas Medan-Kualatanjung-Seimangkei dan WM Medan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung <i>high value economy & industry</i> b) Peningkatan Pelabuhan Belawan dan Kualatanjung c) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Belawan d) Pembebasan tanah lokasi KI Kualatanjung e) Pengembangan LRT Medan terintegrasi TOD f) Pengembangan sistem transmisi migas Seimangkei-Dumai g) Pengembangan SUTET 500 kV Medan-Seimangkei-Perawang h) Pembangunan Tol Medan Intra Urban Toll Road 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Kawasan Afirmasi Kep. Meranti dan Kep. Lingga	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Pembangunan jalan Trans Meranti dan Trans Lingga c) Penguatan Kep. Meranti sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dan kawasan perbatasan d) Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah di Kep. Meranti 	APBN, APBD

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Afirmasi Kep. Natuna dan Kep. Anambas	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni) b) Pembangunan jalan Lingkar Natuna dan Lingkar Anambas c) Penguatan Kep. Natuna dan Kep. Anambas sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dan kawasan perbatasan d) Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah di Ranai e) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Selatlampa f) Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Natuna/Anambas g) Peningkatan kelas RS Umum Daerah Kep. Anambas menjadi kelas C 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
KPBPB BBK	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri prioritas Batam-Bintan-Karimun b) Pengembangan Jembatan Batam-Bintan c) Pengembangan LRT Batam d) Pengembangan KEK BAT, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang e) Pengembangan Rempang <i>Eco City</i> f) Pengembangan Galang <i>Integrated Maritime City</i> g) Pembangunan Waduk Piayu dan Waduk Galang-Galang Baru h) Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Kabil i) Tie-in sistem transmisi migas Pulau Pemping ke WNTS 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Koridor Industri Prioritas Pekanbaru-Dumai	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan BRT Pekanbaru b) Peningkatan Pelabuhan Dumai c) Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai d) Pengembangan koridor pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Muaratakus-Pekanbaru-Siak e) Pembangunan Jembatan Siak V f) Pembangunan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru atau Jalan Lingkar Pekanbaru 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Jambi-Muarojambi	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muarojambi b) Peningkatan pelabuhan Talang Duku c) Pengembangan koridor pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Jambi Kota-Candi Muarojambi 	APBN, APBD, BUMN/Swasta
Belitung dan Pangkalpinang-Sungailiat	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri rintisan Pangkalpinang-Sungailiat b) Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Belitung c) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Tanjung Pandan 	APBN, APBD, BUMN/Swasta

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Koridor Industri Palembang-Tanjungcarat dan WM Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri rintisan Palembang-Tanjungcarat b) Pengembangan Pelabuhan <i>Multipurpose</i> Tanjungcarat c) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Sungsang d) Pengembangan TOD pada sistem LRT Kota Palembang 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Bandar Lampung-Lampung Selatan dan Labuhan Meringgai	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri prioritas Bandar Lampung-Lampung Selatan b) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Labuhanmeringgai c) Pengembangan BRT Bandar Lampung d) Peningkatan jalur kereta api Prabumulih-Tarahan e) Pengembangan <i>direct interconnection</i> Sumatera-Jawa 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU



Arah Pembangunan Wilayah Jawa



Isu dan Potensi Wilayah Jawa

Isu



Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50%

Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (Industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, dibandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000)

Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian Selatan



Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31% dan 8,15%.

Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk wilayah Jawa mencapai 20% (2023).



Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11% (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11%
Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggulan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi

Potensi Wilayah



Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22% dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36% dalam produksi tebu nasional, serta berkontribusi sekitar 51,86% dalam produksi jagung nasional.

Energi: sumber energi primer dalam pengembangan energi bersih (clean energy) berupa sumber EBT Floating Solar Panel (10 GW), EBT Panas Bumi (8,4 GW), dan EBT Air (2 GW)

Industri pengolahan: lebih dari 52% industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap



SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas

Perkotaan: sebanyak 56% penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.



Ketersediaan Infrastruktur Terbangun:

- Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki pelabuhan dan bandara yang cukup besar
- Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95% dari area wilayah pemukiman
- Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70% produksi energi listrik di Indonesia.

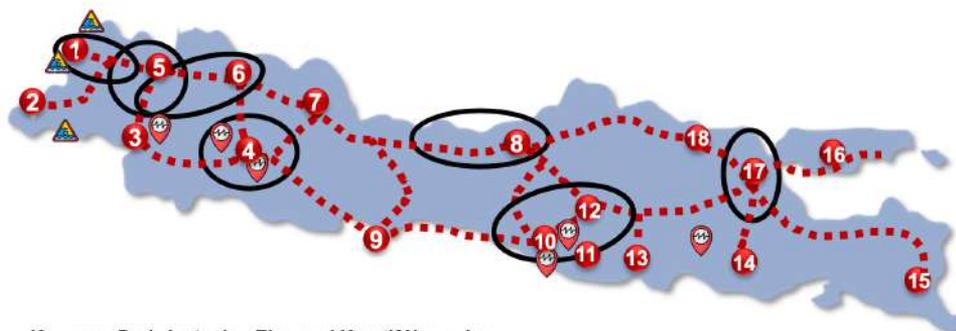
Arah Pembangunan Wilayah Jawa

”Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT
2025	5,3 – 7,4	56,8	82,4 – 88,3	5,12 – 5,65
2029		54,5	116,3 – 132,1	4,54 – 5,30

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	: Kawasan Prioritas Rawan Bencana Gempa Darat
	: Kawasan Prioritas Rawan Bencana Megathrust
	: Bandar Udara
	: Pelabuhan



Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan

- 2 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan **Tanjunglesung-Ujungkulon** (KEK Tanjunglesung dan TN Ujungkulon)
- 3 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan **Bogor-Sukabumi-Cianjur** (KEK Lido, TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Situs Megalitikum Gunungpadang)
- 11 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan kelas dunia **Magelang-Yogyakarta-Solo**
- 15 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan **Lingkar Ijen** (TN Meru Betiri, TN Baluran, dan TN Alas Purwo)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Biru

- 18 Pengembangan industrialisasi perikanan **Lamongan-Tuban-Pati-Rembang**
- 15 Pengembangan industrialisasi perikanan di **Banyuwangi**

Kawasan Afirmasi

- 16 Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas **Kep. Madura**

Kawasan Perkotaan dan Koridor Industri

- 1 Pengembangan koridor industri prioritas **Cilegon-Serang-Tangerang** dan kawasan perkotaan **Cilegon-Serang**
- 4 Pengembangan **WM Bandung**, koridor industri prioritas **Bandung-Cimahi-Padalarang**, dan kawasan pariwisata unggulan **Cekungan Bandung**
- 5 Pengembangan **Jakarta Global City** dan **Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur**
- 6 Pengembangan koridor industri prioritas **Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban**
- 7 Pengembangan koridor industri rintisan **Kertajati-Cirebon (Rebana)**
- 8 Pengembangan **WM Semarang** dan koridor industri prioritas **Batang-Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Kudus** (termasuk KEK Kendal dan KIT Batang)
- 9 Pengembangan koridor industri rintisan **Cilacap**
- 10 Pengembangan kawasan perkotaan **Yogyakarta**
- 12 Pengembangan kawasan perkotaan **Surakarta** dan koridor industri prioritas **Solo-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo**
- 13 Pengembangan kawasan perkotaan dan koridor industri rintisan **Kediri**
- 14 Pengembangan kawasan perkotaan **Malang-Batu** (termasuk KEK Singasari) dan kawasan pariwisata unggulan **BTS**
- 17 Pengembangan **WM Surabaya** dan koridor industri prioritas **Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan-Malang** (termasuk KEK Gresik)

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Koridor Industri Cilegon-Serang-Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan koridor industri prioritas Cilegon-Serang-Tangerang dan kawasan perkotaan Cilegon-Serang b) Pengembangan BRT Cilegon-Serang c) Elektrifikasi dan pembangunan <i>double track</i> KA komuter Merak-Cilegon-Serang-Rangkasbitung d) Pengembangan <i>direct interconnection</i> Sumatera-Jawa 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Kawasan Pariwisata Tanjunglesung-Ujungkulon	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan KEK Tanjunglesung b) Penyelesaian tol Serang-Panimbang c) Peningkatan jalan Panimbang-Ujungkulon 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Kawasan Pariwisata Bogor-Sukabumi-Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan Jalur Puncak II b) Pembangunan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang c) Konservasi dan pemulihan lingkungan TN Gunung Halimun-Salak dan TN Gede-Pangrango d) Penataan kawasan Situs Megalitikum Gunungpadang dan aksesnya 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Jakarta Global City dan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan <i>International Trade and Business Corridor</i> (Glodok-Harmoni-Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman-Kuningan-Kebayoran Baru-Blok M-Fatmawati-Lebakbulus)b) Pengembangan <i>Integrated Smart and Livable City Transformation</i>c) Pengembangan <i>Northern Coast New Economic Corridor</i>d) Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kotae) Pembangunan jalur KA layang di Jakarta <i>inner ring railroad</i> (eliminasi perlintasan sebidang)f) Pembangunan LRT Jabodebekg) Pengembangan MRT <i>East-West</i>	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Koridor Industri Prioritas Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban	<ul style="list-style-type: none">a) Pembangunan Tol JAPEK IIb) Pembangunan akses tol dan kereta api Pelabuhan Patimbanc) Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban terintegrasi <i>dry port</i> dan kawasan industri Patimban	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU, PHLN

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
WM Semarang dan Koridor Industri Prioritas Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan KIT Batang dan KEK Kendal b) Pengembangan kawasan Sayung terintegrasi dengan pelabuhan perikanan modern & industri/hilirisasi perikanan dan kawasan industri modern c) Pengembangan LRT Semarang d) Pembangunan terusan KA Cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Semarang 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Kawasan Perkotaan Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan kawasan perkotaan Surakarta dan koridor industri prioritas Solo-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan tol Bergas-Magelang-Yogyakarta, tol Lingkar Utara Yogya, tol Yogya-Solo, dan tol Yogyakarta-NYIA b) Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A (<i>attractions, accesibilities, amenities, available packages, activities, ancillary services</i>) guna mewujudkan <i>quality & sustainable tourism</i>, termasuk melalui <i>urban renewal</i>, revitalisasi/pengembangan kawasan prioritas, serta pengembangan MICE <i>economy</i>, pada koridor Magelang-Yogyakarta-Solo c) Pengembangan BRT Yogyakarta 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
Kawasan Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan industrialisasi perikanan Lamongan-Tuban-Pati-Rembang b) Pengembangan industrialisasi perikanan di Banyuwangi 	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
WM Surabaya dan Koridor Industri Prioritas Gresik-Surabaya-Mojokerto-Sidoarjo-Malang-Pasuruan	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan SAUM Surabaya (SRRL dan MRT/LRT Surabaya)b) Pengembangan permukiman baru kawasan timur Surabayac) Pembangunan lingkaran timur Surabayad) Pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Surabaya Timure) Pengembangan KEK Gresikf) Pengembangan kawasan perkotaan dan koridor industri rintisan Kedirig) Pengembangan kawasan perkotaan Malang-Batu (termasuk KEK Singasari) dan kawasan pariwisata unggulan BTSh) Pengembangan kawasan pariwisata unggulan Lingkaran Ijen (TN Meru Betiri, TN Baluran, dan TN Alas Purwo)	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU, PHLN
Kawasan Afirmasi	<ul style="list-style-type: none">a) Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kep. Madura	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU
WM Bandung dan Koridor Industri Prioritas Padalarang-Cimahi-Bandung	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan SAUM Bandung (BRT dan LRT Bandung) dan terintegrasi TODb) Pembangunan Tol Bandung <i>Intra Urban Toll Road</i>c) Pengembangan kawasan permukiman dan industri baru di Bandung Timurd) Pembangunan jalur KA layang di Bandung <i>Inner City Rail Road</i> (eliminasi perlintasan sebidang)e) Pembangunan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacapf) Pembangunan terusan KA Cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Semarangg) Pengembangan koridor industri rintisan Kertajati-Cirebon (Rebana)	APBN, APBD, BUMN/Swasta/KPBU

Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusra



Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusra

"Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional"

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT
2025	6,1 – 8,4	2,8	40,0 – 43,2	2,19 – 2,72
2029	6,1 – 8,4	3,0	61,5 – 66,6	1,85 – 2,53

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- : Kawasan Prioritas Rawan Bencana Gempa Darat
- : Kawasan Prioritas Rawan Bencana Megathrust
- : Bandar Udara
- : Pelabuhan



Ket : *) Indikasi lokasi

Kawasan Strategis

- 3 Pengembangan aglomerasi industri **Kawasan Industri Sumbawa Barat** sebagai pusat pertumbuhan baru
- 2 Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas DPP Lombok – Gili Tramenan;
- 5 Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting DPP Labuan Bajo dan destinasi perpanjangannya di Pulau Flores (Kab. Manggarai*, Kab. Ngada*, Kab. Ende*)
- 1 Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality & sustainable tourism* sesuai klasterisasi keunggulan aktivitas kepariwisataan di **Provinsi Bali**

Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Tersebar di beberapa Kab/Kota

Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat intra dan antar wilayah

Kawasan Sentra Produksi Pangan

- 6 10 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu yang didukung dengan kawasan transmigrasi Tasifeto-Mandeu dan KSPP Sumba Tengah

Tersebar di beberapa Kab/Kota

Penguatan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan pertanian holistik kemitraan hulu-hilir sesuai klasterisasi pengembangan koridor pangan dan pertanian prioritas di **Provinsi Bali**; pengembangan Lumbung Pangan Nasional berupa pertanian dan peternakan di **Kab. Sumbawa, Provinsi NTB**; serta penguatan sentra pangan lokal berupa pertanian tanaman pangan, akuatik, hewani, dan buah-buahan di **Provinsi NTT**

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan

Kawasan Pariwisata Rintisan

- 4 Penyiapan kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba (Kab. Sumba Barat Daya*)

Kawasan Terintegrasi Berbasis Perikanan

- 4 7 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas rumput laut di **Kab. Alor***, **Kab. Sumba Timur***, serta **Kab. Kupang*** dan **Kota Kupang*** dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya

Kawasan Perkotaan

- 1 Pengembangan ekosistem *high value economy & industry* pada WM Denpasar (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan)
- 1 Pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja (Kab. Buleleng) sebagai Kota Pendidikan dan Riset Berwawasan Global serta Kota Pariwisata Pusaka dan Sejarah;
- 2 Pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Mataram
- 5 Pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Manggarai Barat

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Provinsi Bali	<p>Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan <i>quality & sustainable tourism</i> sesuai klusterisasi keunggulan aktivitas kepariwisataan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan koridor pariwisata prioritas: nusapenida, Bali Barat, Bali Utara, Bali Tengah, Bali Selatan, dan Bali Timur pengembangan Kawasan Wisata Ulapan (Ubud, Tegalalang, dan Payangan), Kawasan Wisata Serangan, dan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kab. Klungkung) Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata di Kab. Jembrana, Buleleng, Tabanan, dan Klungkung 	APBN, APBD, DAK
<ul style="list-style-type: none"> • DPP Lombok Gili – Tramena (Kota Mataram dan 4 Kab di Pulau Lombok) • DPP Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dan DPP Labuan Bajo - Flores Extension (Kab. Manggarai, Kab. Ende, dan Kab. Ngada) • Pariwisata Rintisan (Kab. Sumba Barat Daya) 	<p>Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas DPP Lombok – Gili Tramena; serta penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting DPP Labuan Bajo dan perpanjangannya di Pulau Flores melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan aksesibilitas; pengembangan atraksi; serta pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata penguatan dan perluasan pemasaran; serta pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur 	APBN, APBD, DAK

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Industri Sumbawa Barat (Kab. Sumbawa Barat)	Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat sebagai pusat pertumbuhan baru melalui (a) perencanaan KI prioritas; (b) perizinan KI/KEK prioritas; dan (c) penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk KI/KEK prioritas	APBN, APBD, DAK
Wilayah Metropolitan Denpasar (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan)	Pengembangan ekosistem <i>high value economy & industry</i> pada WM Denpasar melalui: a. Pengembangan ekosistem <i>luxury fashion</i> dan <i>high-end craftsmanship</i> b. Pengembangan ekosistem industri pangan <i>high value & high quality</i> (a.l. <i>wine</i> , kopi kualitas tinggi) c. Peningkatan daya tarik ekonomi digital dan ekonomi kreatif untuk menarik <i>digital nomad</i> dan/atau <i>global IT-based company</i> melalui pengembangan jaringan internet berkecepatan tinggi 5G, terutama di WM Denpasar	APBN, APBD, DAK
<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Perkotaan Singaraja (Kab. Buleleng)• Kawasan Kota Pariwisata Mataram (Kota Mataram)• Kawasan Perkotaan Pariwisata Manggarai Barat (Kab. Manggarai Barat)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai Kota Pendidikan dan Riset Berwawasan Global serta Kota Pariwisata Pusaka dan Sejarah; Kawasan Perkotaan Pariwisata Mataram; dan Kawasan Perkotaan Pariwisata Manggarai Barat melalui: a. peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan b. penataan Kawasan dan peningkatan citra kota	APBN, APBD, DAK

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Alor* (termasuk PKSN Alor-Kalabahi)* • Kab. Sumba Timur* • Kab. Kupang* • Kota Kupang* 	<p>Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penguatan sentra produksi, serta pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk rumput laut b. peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri c. peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan d. peningkatan sarana prasarana pendukung, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi 	<p>APBN, APBD, DAK</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Bali • Provinsi NTB • Provinsi NTT 	<p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat intra dan antar wilayah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan peningkatan jalan strategis b. Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran baik untuk penumpang maupun logistik c. Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan termasuk trayek bus Listrik di Kawasan Ulan e. Penguatan infrastruktur TIK 	<p>APBN, APBD, DAK</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<ul style="list-style-type: none">• KSPP Sumba Tengah (Kab. Sumba Tengah)• KSPP Belu (Kab. Belu)	<p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu yang didukung dengan kawasan transmigrasi Tasifeto-Mandeu dan KSPP Sumba Tengah melalui (a) penyiapan pengembangan Kawasan; (b) penyediaan sarana dan prasarana produksi; dan (c) penguatan pascapanen dan tata kelola</p>	APBN, APBD, DAK
<ul style="list-style-type: none">• Provinsi Bali (Kab. Kab. Buleleng, Gianyar, Badung, Klungkung, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Bangli)• Provinsi NTB (Kab. Sumbawa)• Provinsi NTT (Kab. Alor*, Kab. Sabu Raijua*, Kab. Timor Tengah Utara*, Kab. Malaka*)	<p>Penguatan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan pertanian holistik kemitraan hulu-hilir sesuai klusterisasi pengembangan koridor pangan dan pertanian prioritas di Provinsi Bali; pengembangan Lumbung Pangan Nasional berupa pertanian dan peternakan di Kab. Sumbawa, Provinsi NTB; serta penguatan sentra pangan lokal berupa pertanian tanaman pangan, akuatik, hewani, dan buah-buahan di Provinsi NTT melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a.penguatan produksi dan pasca panen pangan lokalb.penyiapan sarana prasarana pendukungc.penguatan kapasitas SDM (petani dan kelompok tani) yang terlatih GAP, GHP, dan PHTd.penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani termasuk koperasi sektor produksie.pengembangan koridor pangan dan pertanian prioritas: Bali bagian utara, Bali bagian Tengah, Bali bagian Barat, dan Bali bagian Timur	APBN, APBD, DAK



Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan



Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan

Isu



Pertambangan dan perkebunan kelapa sawit masih memiliki peran sangat besar di sektor hulu, sementara proses hilirisasi industri berjalan lambat.



Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.



Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) disertai rendahnya Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan belum optimal, dengan konektivitas dan infrastruktur dasar yang terbatas.

Potensi Wilayah



Potensi sektor pertambangan dan penggalian (batubara, bauksit, gas alam cair, pasir zircon, pasir kuarsa, biji besi), pertanian (tanaman pangan), serta perdagangan.



Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang besar bagi wilayah Kalimantan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.



Potensi untuk transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan di Kalimantan Utara dalam mendukung pengembangan lumbung energi nasional di Kalimantan.



Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II sebagai potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi berbasis laut dan sungai.

Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

” Superhub Ekonomi Nusantara ”

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT
2025	6,1 – 8,1	8,6	109,5 – 117,5	4,21 – 4,57
2029		9,6	170,9 – 177,7	3,44 – 4,23

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ket:

- : Bandara Udara
- : Pelabuhan



Kawasan Perkotaan

Pengembangan infrastruktur dan ekonomi di kawasan perkotaan meliputi:

- 1 Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing.
- 3 Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin.
- 4 Pembangunan Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitar Ibu Kota Nusantara
- 7 Pengembangan Kota Tanjung Selor dan Kota Tarakan.

Kawasan Komoditas Unggulan

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kalimantan melalui:

- 2 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas

Kawasan Konservasi

Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan melalui:

- 6 Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Kawasan Konservasi termasuk Heart of Borneo disertai peningkatan upaya mitigasi penanggulangan bencana

Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan hilirisasi dan penguatan pusat-pusat industri, serta kawasan pariwisata melalui:

- 5 Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya khususnya di Kawasan Industri Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, Provinsi Kalimantan Utara.
- 8 Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau

Kawasan Afirmasi

Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis dan Perbatasan Prioritas melalui:

- 9 Pengembangan Kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan kecamatan perbatasan prioritas di Wilayah Kalimantan bagian utara.
- 10

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Industri Ketapang - Kabupaten Ketapang	<ul style="list-style-type: none">a) Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga dan bauksitb) Pengembangan industri hilir nikel, tembaga dan bauksitc) Peningkatan penerapan standarisasi di industri nikel, tembaga dan bauksitd) Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kerja di industri nikel, tembaga dan bauksite) Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, Tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki)f) Jaminan ketersediaan bahan baku industri sawit, kelapa dan rumput laut yang berkualitasg) Pengembangan industri hilir sawit, kelapa dan rumput laut,	APBN, APBD, SWASTA
Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing - Kabupaten Mempawah - Kabupaten Landak - Kota Pontianak - Kota Singkawang	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan bandarab) Pembangunan jalan nasionalc) Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak, dengan output: bantuan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) bidang Perumahand) Fasilitasi pembangunan rumah baru	APBN, APBD, SWASTA

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah - Kabupaten Pulang Pisau - Kabupaten Kapuas	a) Penyiapan kawasan pertanian dan infrastruktur pendukung KSPP, b) Penyiapan sarana pengembangan KSPP c) Penguatan pascapanen dan kelembagaan KSPP	APBN, APBD
Wilayah Metropolitan Banjarmasin -Kota Banjarmasin -Kota Banjarbaru -Kabupaten Banjar -Kabupaten Barito Kuala -Kabupaten Tanah Laut	a) Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya b) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan c) Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh d) Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu	APBN, APBD, KPBU, SWASTA

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning - Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan	<ul style="list-style-type: none">a) Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industrib) Pengembangan industri hilirc) Peningkatan penerapan standarisasi industrid) Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kerja industrie) Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industrif) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan	APBN, APBD, KPBU, SWASTA
Kota Tanjung Selor Kota Tarakan	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)b) Penyediaan hunian publik vertikal sewac) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusatd) Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Air/Landfill Under Reclamation (TPA/LUR)e) Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahanf) Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan dan penyediaan <i>Public Service Obligation</i>/Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) dan layanan nonkomersilg) Pengembangan bandara	APBN, APBD, KPBU, SWASTA

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Pusat Pertumbuhan Perbatasan Negara <ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Barat - Kalimantan Utara 	a) Pemenuhan layanan dasar b) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi c) Penataan ruang kawasan perbatasan dan penanggulangan bencana	APBN, APBD
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara Kawasan Konservasi Taman Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Tanjung Puting dan Sebangau Kalimantan Tengah 	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan <ul style="list-style-type: none"> a) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan b) Peningkatan kualitas ekosistem gambut c) Rehabilitasi ekosistem <i>mangrove</i> d) Penyediaan informasi pendukung peningkatan ketahanan iklim e) Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan f) Pelaksanaan penataan aset reforma agraria g) Pelayanan peringatan dini multiancamaman bencana Kawasan Konservasi Taman Nasional <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi b) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati 	APBN, APBD

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara <ul style="list-style-type: none">- Ibu Kota Nusantara- Kota Samarinda- Kota Balikpapan- Kota Bontang- Kabupaten Penajam Paser Utara- Kabupaten Kutai Kartanegara- Kabupaten Kutai Timur- Kabupaten Paser	Ibu Kota Nusantara <ul style="list-style-type: none">a) Pembangunan kawasan dan pemindahanb) Pembangunan <i>superhub</i> ekonomi Ibu Kota Nusantarac) Pembangunan sosial dan sumber daya manusiad) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah Sekitar Ibu Kota Nusantara <ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan kluster ekonomi dan pembangunan infrastruktur lanjutan mendukungb) Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistikc) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan lautd) Peningkatan layanan dan prasarana bandarae) Pengembangan moda transportasi berkelanjutanf) Pengembangan pertanian dan kawasan pangang) Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong industri padat karya dan industri hilirh) Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasii) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang untuk mendukung pangan	IKN APBN (BELANJA K/L), APB IKN*, DANA TRANSFER IKN*, KPBU, SWASTA MURNI <i>*Berlaku ketika status sudah menjadi Daerah Khusus</i> Daerah Sekitar IKN APBN, APBD, KPBU, SWASTA
Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau <ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Berau	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan kluster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara	APBN, APBD



Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi



Isu dan Potensi Wilayah Sulawesi

Isu



Meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.



Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal, sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja.



Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian.



Kurang memadainya sarana dan prasarana layanan dasar dan belum meratanya konektivitas antardaerah.

Potensi Wilayah



Posisi geografis terletak di antara ALKI II dan III yang dapat mendukung peran Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional KTI



Pembangunan IKN di Kalimantan membuka peluang besar bagi Wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga.



Potensi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.



Potensi pertambangan dan pengolahan nikel dan tembaga yang mendukung pengembangan dan implementasi energi baru terbarukan.

Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi

"Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA"

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	IP1
2025	7,6 – 10,2	7,4	80,2 – 86,2	3,30 – 3,73
2029		7,6	121,6 – 141,7	2,85 – 3,45

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ket:

: Bandar Udara

: Kawasan Prioritas Rawan Bencana Gempa Darat

: Pelabuhan

Kawasan Komoditas Unggulan

Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan (Pertanian, Perkebunan dan Perikanan), diantaranya:

- 1 Pengembangan Kawasan berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya dan Pengembangan Kawasan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara
- 2 Pengembangan Kawasan Pertanian Jagung, Kelapa dan Garam di Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo
- 3 Peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan kopi) yang berkelanjutan di Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Pasangkayu dan Kota Mamaju, Sulawesi Barat.
- 4 Pengembangan kawasan ekonomi (pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian) di Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala dan sekitarnya di Sulteng.
- 5 Peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan (kakao, dan kopi) yang berkelanjutan di Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Pinrang dan Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian dan Perikanan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya (pangan dan perikanan), dan Kab. Takalar (perikanan: rumput laut), Sulawesi Selatan
- 6 Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Tangkap di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Lumbung Pangan di Sulawesi Tenggara.

Kawasan Perkotaan

- 1 Pembangunan Wilayah Metropolitan yang berkelanjutan di WM Manado (Bimindo), Sulawesi Utara sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik dan Peningkatan Kawasan Pertumbuhan Maminasata - Pare-Pare, Sulawesi Selatan.



Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi berupa Kawasan Industri Pengolahan Hasil Pertambangan dan Smelter Terintegrasi Tambang, diantaranya:

- 4 KI Stardust Estate Investment, KI IMIP Morowali, dan KI IHIP Huabao - (nikel dan hasil pertambangan lainnya), Sulawesi Tengah
- 5 Kawasan Smelter terintegrasi Tambang Sorowako, Sulawesi Selatan
- 6 KI IP1P Pomalaa, KI VDNIIP Konawe (nikel, aspal, pertanian, perkebunan, dan perikanan), Sulawesi Tenggara
- 1 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang di Sulawesi Utara dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Sulawesi Tenggara dengan implementasi blue, green, circular economy.

Kawasan Konservasi

Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan, diantaranya:

- 2 Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan di Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya
- 4 Pengembangan Kawasan Perairan Togean-Banggai dan sekitarnya, Sulteng
- 5 Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulsel

Kawasan Afirmasi

- 1 Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Perbatasan di Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kawasan Pertumbuhan di Wilayah Metropolitan dan Sekitarnya Lingkup Pulau Sulawesi</p> <p>1) Kawasan Pertumbuhan Maminasata - Pare-Pare: Kab. Makassar, Kab. Maros, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kota Pare-Pare, Kab. Barru, Kab. Pangkajene dan Kepulauan</p> <p>2) Wilayah Metropolitan Manado (Bimindo): Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara</p>	<p>Peningkatan Kualitas Kawasan Pertumbuhan di Wilayah Metropolitan dan Sekitarnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan,Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaanPeningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudayaPeningkatan kapasitas tata kelola perkotaan dan kualitas lingkunganPeningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakanPembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sistem terpusatPenyusunan dan sinkronisasi perencanaan sanitasiPengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel (KA Makassar-Parepare) dan jalanKerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerahPengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga, khususnya Stadion Sudiang	<p>APBN</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kawasan Sentra Pertanian dan Perikanan Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya (pangan dan perikanan): Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kota Palopo</p> <p>Kabupaten Takalar (perikanan: rumput laut)</p> <p>Kawasan Pertanian Provinsi Gorontalo (Jagung, Kelapa dan Garam): Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango</p> <p>Kawasan Perikanan Budidaya Sulawesi Barat: Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju</p> <p>Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara: Kab. Bombana, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan</p> <p>Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara: Kab. Muna, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Kab. Bombana</p> <p>Kawasan Pengembangan Ekonomi Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, dan sekitarnya (pangan, perkebunan, perikanan): Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Poso, Kab. Buol, Kab. Toli-Toli</p> <p>Kawasan Perikanan Bitung: Kota Bitung</p> <p>Kawasan berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya: Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu</p>	<p>Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian dan Perikanan di Pulau Sulawesi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hilirasasi komoditas pertanian strategis/unggulan, swasembada pangan, modernisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan SDM Pengembangan ekonomi biru, pemenuhan sarana dan prasarana, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan swasembada pangan dan ekspor di bidang perikanan, serta peningkatan kualitas SDM, terutama perikanan budidaya Peningkatan produksi dan pascapanen pangan Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro Penguatan produksi dan pengolahan komoditas kelautan dan perikanan Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan Penguatan konektivitas daerah Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan Pengembangan kluster komoditas ikan budidaya Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan budidaya Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap 	<p>APBN, APBD</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan	
<p>Kawasan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kopi: Kab. Toraja Utara, Kab. Mamasa• Kakao: Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Pinrang, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur• Kelapa Sawit: Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Polewali Mandar	<p>Pengembangan Kawasan Perkebunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan eksporb) Implementasi pertanian rendah karbonc) Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktifd) peningkatan produksi perkebunane) pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produkf) peningkatan kualitas SDM dan tata kelola kelembagaan serta akses pembiayaang) peningkatan sarana prasarana pendukungh) Penguatan akses pasar dan pembiayaan	<p>pengembangan komoditas pertanian</p> <ul style="list-style-type: none">i) Peningkatan produksi pangan nabatij) Penguatan pasca panen pangan nabatik) Pengembangan kawasan dan benih padi biofortifikasil) Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garamm) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian mudan) Pengembangan praktik pertanian berkelanjutano) Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan	<p>APBN, APBD, DAK</p>
<p>Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)</p> <ul style="list-style-type: none">• DPP Manado-Likupang: Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara• DPP Wakatobi: Kab. Wakatobi	<p>Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas di Pulau Sulawesi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i>, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan aksesibilitas pariwisatab) Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)c) Pembangunan Prasarana Umum,	<p>Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisatab) Pemasaran Pariwisatac) Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasid) Peningkatan Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana	<p>APBN, APBD, DAK</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kawasan Industri Pengolahan Hasil Pertambangan dan Smelter Terintegrasi Tambang</p> <ul style="list-style-type: none"> • KI Stardust Estate Investment: Kab. Morowali Utara • KI IMIP Morowali: Kab. Morowali • KI IHIP Huabao: Kab. Morowali • KI IPIP Pomalaa: Kab. Kolaka • KI VDNIP Konawe: Kab. Konawe • Kawasan Smelter terintegrasi Tambang Sorowako: Kab. Luwu Timur 	<p>Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel, aspal, pertanian, perkebunan, dan perikanan) serta penataan perkotaan berbasis industri di Pulau Sulawesi melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Industri Hilir Nikel, Tembaga, Bauksit, termasuk hilirisasinya b) Dekarbonisasi dan sirkular ekonomi di industri nikel c) Pengembangan rantai pasok antara industri besar di KI/KEK prioritas dengan IKM dan UMKM d) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan SDM e) Perencanaan kawasan untuk mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional f) Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan h) Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh 	<p>APBN, APBD, SWASTA</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kawasan Pesisir dan Kepulauan</p> <p>Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya: Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kota Palopo</p> <p>Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan: Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Kepulauan Selayar</p> <p>Teluk Gorontalo dan sekitarnya: Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Boalemo</p> <p>Kawasan Perairan Togean-Banggai dan sekitarnya: Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut</p>	<p>Pemenuhan infrastruktur layanan dasar dan transportasi, serta peningkatan perekonomian di kawasan pesisir dan kepulauan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman (air minum, limbah, listrik, persampahan, sanitasi)Peningkatan layanan transportasi dan konektivitas lautPeningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairanPengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistemRehabilitasi hutan dan lahanPengendalian banjir di kawasan perkotaan, pesisir, dan daerah rawan banjirPenanganan permukiman kumuh terpadu dan fasilitasi peningkatan kualitas rumahPenyediaan sarana dan prasarana permukiman pada perumahan tapakPengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalanPenguatan kapasitas infrastruktur dan pelayanan kesehatan kawasan pesisir dan kepulauan	<p>APBN, APBD, DAK</p>
<p>Kawasan Pusat Pertumbuhan Perbatasan Sulawesi Utara</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Kepulauan SangiheKab. Kepulauan Talaud	<p>Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Penguatan pertahanan negara,Pemenuhan layanan dasar,Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi,Penguatan keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar melalui penataan ruang dan penanggulangan bencana dan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana.	<p>APBN, APBD, DAK</p>

Arah Pembangunan Wilayah Maluku



Isu dan Potensi Wilayah Maluku

Isu



Pertumbuhan ekonomi melambat terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Prov Maluku Utara dan Sektor Pertanian di Prov. Maluku. **TPT di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional**, yang didominasi oleh lulusan di atas Pendidikan Dasar



IPM termasuk yang terendah di Indonesia. Beberapa permasalahan: rendahnya keterjangkauan ke fasilitas pendidikan dan kerusakan infrastruktur sekolah, kurangnya tenaga medis dan kesehatan, rendahnya keterjangkauan ke fasilitas kesehatan, dan rendahnya akses sanitasi yang aman.



Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku lebih tinggi dibanding nasional. Faktor yang memengaruhi diantaranya Nilai Tukar Petani masih di bawah nasional dan rata-rata upah buruh sektor industri di Maluku (1,9 juta) lebih rendah dibandingkan nasional (3,2 juta).

Potensi Wilayah



Wilayah Maluku terdiri dari >80% lautan sehingga memiliki potensi perikanan yang tinggi. **Produksi Tuna-Cakalang-Tongkol Provinsi Maluku tertinggi se-Indonesia.**



Provinsi Maluku Utara memiliki produksi pala tertinggi ke-2 secara nasional dengan luas area perkebunan sebesar 25,9% dari nasional. **Maluku Utara memiliki produksi kelapa tertinggi ke-3 secara nasional.**



Wilayah Maluku memiliki ekosistem bahari serta kekayaan sejarah dan budaya untuk destinasi pariwisata, seperti pada DPP Morotai dan KSPN Banda Neira dskt.



Terdapat potensi pertambangan nikel serta gas alam, seperti di KI Teluk Weda, KI Obi, dan KI Buli serta Blok Masela.

Arah Pembangunan Wilayah Maluku

“Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT
2025	11,7 – 14,9	0,8	54,8 – 59,1	4,83 – 5,19
2029	11,7 – 14,9	1,0	100,9 – 115,3	4,15 – 4,76

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kawasan Strategis

Destinasi Pariwisata Prioritas

- 1 Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting DPP Morotai

Kawasan Industri (KI)

- 5 Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting di KI Buli.
- 6 Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting di KI Teluk Weda dan
- 7 Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting di KI Obi.
- 12 Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela)

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan (1/2)

Kawasan Terintegrasi berbasis Perikanan

- 8 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol (TCT), udang, dan lobster di Kota Ambon yang didukung dengan peningkatan PPN Ambon.
- 10 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas TCT, udang, dan lobster di Kota Tual yang didukung dengan peningkatan PPN Tual.

Kawasan Pariwisata Rintisan

- 7 Pengembangan kawasan pariwisata rintisan (Kepulauan Guraici dskt.) di Kab. Halmahera Selatan.
- 9 Pengembangan kawasan pariwisata rintisan (Banda Neira) di Kab. Maluku Tengah.



Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan (2/2)

Kawasan Perkotaan

- 1 Pengembangan kota kecil berkarakter khusus Daruba.
- 4 Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
- 6 Pengembangan kota industri Weda dan penataan kawasan sekitar KI Teluk Weda.
- 9 Pengembangan kota kecil berkarakter khusus Banda Neira.
- 11 Pengembangan kawasan perkotaan Saumlaki.

Kawasan Terintegrasi Berbasis Perkebunan

Sentra produksi berbasis komoditas pala

- 2 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala di Kab. Halmahera Utara.
- 3 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala di Kab. Halmahera Barat.
- 6 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala di Kab. Halmahera Tengah.

Ekosistem sentra industri berbasis komoditas kelapa

- 3 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas kelapa di Kab. Halmahera Barat.

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<ul style="list-style-type: none">• KI Teluk Weda (Kab. Halteng)• KI Obi (Kab. Halsel)• KI Buli (Kab. Haltim)	<p>Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting di KI Teluk Weda, KI Obi, dan KI Buli melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Perencanaan, perizinan, dan tata ruangb) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan, serta penguatan hilirisasi pertambangan dan turunannyac) Peningkatan investasi dan promosi ekspor, pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, serta penyediaan SDM berkualitas	APBN
<p>Kawasan Pariwisata Eksisting</p> <ul style="list-style-type: none">• DPP Morotai (Kab. Pulau Morotai) <p>Kawasan Pariwisata Rintisan</p> <ul style="list-style-type: none">• Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)• Kepulauan Guraici dskt.(Kab. Halmahera Selatan)	<p>Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Morotai) dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan (Banda Neira dan Kepulauan Guraici dskt.) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Peningkatan aksesibilitas pariwisatab) Pengembangan atraksi, serta pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenities pariwisatac) Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisatad) Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisatae) Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim	APBN, APBD, DAK

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Tuna-Cakalang-Tongkol, Udang, dan Lobster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Ambon • Kota Tual <p>Kelapa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Halmahera Barat 	<p>Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster, serta kelapa dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan sentra produksi komoditas Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan/penyuluhan Pengembangan industri pengolahan, serta perluasan tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor Peningkatan sarana prasarana pendukung Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, akses terhadap pembiayaan, serta pengelolaan pemanfaatan ruang Pengembangan riset dan inovasi teknologi produksi dan industri 	<p>APBN, APBD, DAK</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Utara 	<p>Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung Peningkatan kualitas SDM Perluasan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan 	<p>APBN, APBD, DAK</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar)	Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) melalui: a) Penyiapan wilayah kerja pengembangan, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan gas bumi b) Penyiapan kapasitas SDM dan penyiapan pembangunan sarana dan prasarana luar kawasan	APBN
Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)	Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: a) Pembangunan pusat pemerintahan b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi c) Peningkatan infrastruktur perkotaan	APBN, APBD, DAK
<ul style="list-style-type: none">• Banda Neira (Kab. Malteng)• Saumlaki (Kab. Kep. Tanimbar)• Weda dan kawasan perkotaan sekitar KI Teluk Weda (Kab. Halmahera Tengah)• Daruba (Kab. Pulau Morotai)	Pengembangan kawasan perkotaan (kota industri dan kota kecil berkarakter khusus) melalui: a) Peningkatan pelayanan dasar dan penataan infrastruktur perkotaan b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi c) Penataan kawasan dan peningkatan citra kota	APBN, APBD, DAK

Arah Pembangunan Wilayah Papua



Isu dan Potensi Wilayah Papua

Isu



LPE provinsi di Wilayah Papua, tumbuh lebih tinggi dari nasional, kecuali Papua Barat dan Papua Tengah. Namun, Papua Barat (industri migas) dan Papua Tengah (tembaga/emas) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian wilayah Papua. Selain itu, disparitas ketimpangan wilayah dan golongan pendapatan masih tinggi karena infrastruktur dan konektivitas belum merata



IPM Wilayah Papua berada pada kategori yang rendah karena terbatasnya ketersediaan dan sulitnya aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, belum meratanya distribusi guru dan tenaga kesehatan, tingginya *stunting*, dan beberapa kab/kota belum eliminasi malaria. Selain itu, akses terhadap air minum dan sanitasi aman masih rendah di Wilayah Papua.



Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi (71% kab/kota termasuk tertinggal). PPM Papua dan Papua Barat lebih tinggi dibanding nasional. Faktor yang memengaruhi diantaranya: (1) rendahnya kualitas SDM; (2) rendahnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah; (3) menurunnya jumlah UMKM secara signifikan

Potensi Wilayah



Provinsi Papua memiliki tingkat produksi komoditas tuna-cakalang-tongkol tertinggi yang didukung SKPT Biak dan rumah tangga usaha sub sektor perikanan tangkap laut berjumlah 13.632 unit, 70% nya terbesar di Kab. Biak Numfor, Kab. Kep. Yapen, dan Kab. Supiori.



Keunggulan sektor perkebunan salah satunya adalah Provinsi Papua Barat (kakao Ransiki) yang perkebunannya dikelola secara organik dan professional oleh PT. Ebier Suth Cokran yang bekerja sama dengan PT. Cargill Indonesia dalam penjualan 12 ton biji kakao kering (2020) dan 29,5 ton (2021); serta telah ekspor 6 ton biji kakao kering ke Inggris.



Wilayah Papua memiliki ekosistem bahari serta tradisi lokal yang dapat dikembangkan untuk destinasi pariwisata, seperti pada DPP Raja Ampat dan TN Teluk Cenderawasih, pariwisata budaya, Danau Anggi, dan Lembah Baliem.



Terdapat potensi pertambangan minyak dan gas bumi di Kab. Teluk Bintuni yang akan menopang kebutuhan produksi industri pupuk di KI Fakfak serta emas, perak, dan tembaga di Kab. Mimika.

Arah Pembangunan Wilayah Papua

“Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif “

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT
2025	5,7 – 7,8	1,9	74,5 – 80,0	3,10 – 3,45
2029		2,1	115,8 – 121,0	2,54 – 2,89

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Kawasan Strategis

Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

- 1 Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting DPP Raja Ampat di Kab. Raja Ampat

Kawasan Industri (KI)

- 4 Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru KI Fakfak di Kab. Fakfak.

Kawasan Sentra Produksi Pangan

- 10 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kab. Merauke
- 14 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kab. Keerom.

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan (1/3) Ibu Kota Daerah Otonom Baru

- 1 Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota DOB Provinsi Papua Barat Daya serta kota perdagangan, jasa, dan industri,
- 7 Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota DOB Provinsi Papua Tengah.
- 10 Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi DOB Provinsi Papua Selatan.
- 12 Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota DOB Provinsi Papua Pegunungan.

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan (2/3)

Kawasan Terintegrasi berbasis Perikanan

- 2 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang di Kota Sorong dan Kab. sorong
- 8 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol di Kab. Mimika dan Kab. Nabire
- 17 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol di Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura, dan Kota Jayapura.
- 19 Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol di Kab. Merauke

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan (3/3)

Kawasan Pariwisata Rintisan

- 5 Pengembangan kawasan pariwisata rintisan alam dan budaya Danau Anggi Giji dan Anggi Gida di Kab. Pegunungan Arfak.
- 6 Pengembangan kawasan pariwisata rintisan bahari Teluk Triton di Kab. Kaimana.
- 7 Pengembangan kawasan pariwisata rintisan bahari di Kab. Nabire (TN Teluk Cendrawasih).
- 10 Penyiapan kawasan pariwisata rintisan budaya di Kab. Asmat.
- 13 Penyiapan kawasan pariwisata rintisan budaya (minat khusus) Lembah Baliem di Kab. Jayawijaya.
- 17 Penyiapan kawasan pariwisata rintisan bahari di Kab. Biak Numfor.

Kawasan Perkotaan

- 5 Pengembangan kota kecil berkarakter khusus Anggi di Kab. Pegunungan Arfak

Kawasan Terintegrasi Berbasis Perkebunan

Sentra produksi berbasis komoditas sagu

- 10 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu di Kab. Mappi, Kab. Asmat, dan Kab. Merauke

Sentra produksi berbasis komoditas kopi

- 8 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi di Kab. Mimika.
- 12 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi di Kab. Lanny Jaya dan Kab. Jayawijaya

Sentra produksi berbasis komoditas kakao

- 18 Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kakao di Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Manokwari

Infrastruktur Pelayanan Dasar

- 3 16 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekotak terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpota asrama pada beberapa Kab/Kota diantaranya: Provinsi Papua (9 kab/kota); Provinsi Papua Barat (7 kab/kota); Provinsi Papua Selatan (4 kab/kota); Provinsi Papua Tengah (8 kab/kota); Provinsi Papua Pegunungan (8 kab/kota); Provinsi Papua Barat Daya (6 kab/kota)
- 15 11
- 13 9

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
KI Fakkak (Kab. Fakkak)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakkak , melalui: a) perencanaan, perizinan, dan tata ruang KI b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung di sekitar KI c) peningkatan investasi dan promosi ekspor d) fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok e) penyediaan SDM berkualitas	APBN
Kawasan pariwisata prioritas eksisting: <ul style="list-style-type: none">DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat) Kawasan pariwisata rintisan: <ul style="list-style-type: none">Teluk Triton (Kab. Kaimana)Danau Anggi (Kab. Peg. Arfak)TN Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire)Budaya Asmat (Kab. Asmat)Lembah Baliem (Kab. Jayawijaya)	Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat) dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan , melalui: a) peningkatan aksesibilitas pariwisata b) pengembangan atraksi c) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata d) pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata e) penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata f) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata g) peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim	APBN, APBD, DAK, Dana Otsus DTI

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>Kakao:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Manokwari Kab. Manokwari Selatan <p>Kopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Mimika Kab. Jayawijaya Kab. Lanny Jaya <p>Sagu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Merauke Kab. Asmat Kab. Mappi 	<p>Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kakao, kopi, dan sagu dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan produksi perkebunan pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk peningkatan kualitas SDM peningkatan sarana prasarana pendukung peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan 	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>
<p>Udang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Sorong Kota Sorong <p>TCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Jayapura Kota Jayapura Kab. Biak Numfor Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Merauke 	<p>Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol dan udang dengan dukungan kontribusi kabupaten sekitarnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penguatan sentra produksi pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan 	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<ul style="list-style-type: none">Provinsi Papua (9 kab/kota)Provinsi Papua Barat (7 kab/kota)Provinsi Papua Selatan (4 kab/kota)Provinsi Papua Tengah (8 kab/kota)Provinsi Papua Pegunungan (8 kab/kota)Provinsi Papua Barat Daya (6 kab/kota)	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayahpendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papuapemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan yang bertugaspeningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana dan alat kesehatan	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>
<ul style="list-style-type: none">Provinsi Papua (9 kab/kota)Provinsi Papua Barat (7 kab/kota)Provinsi Papua Selatan (4 kab/kota)Provinsi Papua Tengah (8 kab/kota)Provinsi Papua Pegunungan (8 kab/kota)Provinsi Papua Barat Daya (6 kab/kota)	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papuapemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik yang bertugaspemberian bantuan pendidikan, makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, serta sarana dan prasarana fasilitas pendidikanpeningkatan tata kelola pendidikan, budaya baca dan literasi, serta penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papuapeningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
<p>KSPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KSPP Merauke • KSPP Keerom <p>Pangan lokal (sagu, padi, ubi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh provinsi di Wilayah Papua 	<p>Pengembangan KSPP Merauke dan KSPP Keerom serta penguatan sentra pangan lokal, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) peningkatan produksi b) penyediaan sarana prasarana pendukung c) penguatan kapasitas SDM (petani dan kelompok tani) d) penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani 	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>
<p>Kota Kecil Berkarakter Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggi (Kab. Pegunungan Arfak) <p>Ibu Kota DOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Merauke • Kab. Nabire • Kab. Jayawijaya • Kota Sorong 	<p>Pengembangan kota kecil berkarakter khusus Anggi dan ibu kota DOB, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah b) peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan c) penataan kawasan dan peningkatan citra kota 	<p>APBN, APBD, DAK, Dana Otsus, DTI</p>



Kementerian PPN/
Bappenas

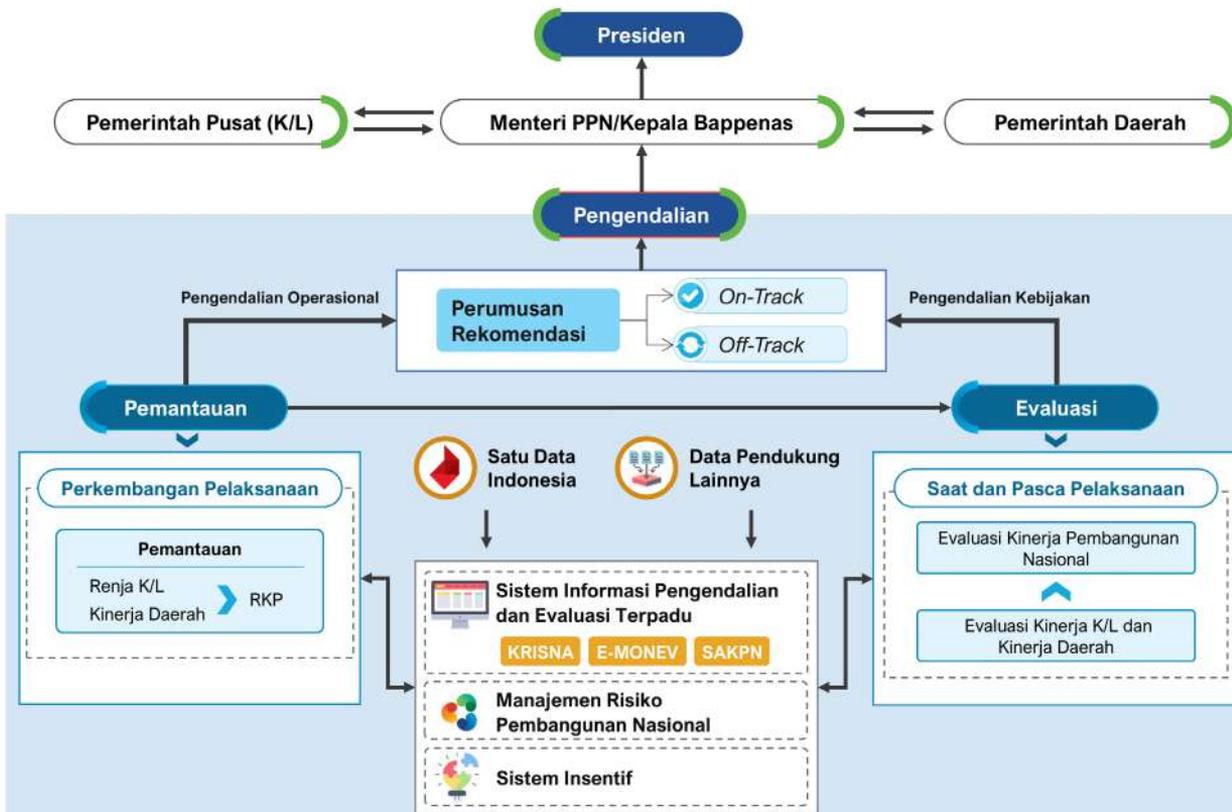
INDONESIA
EMAS
2015



04.

Kerangka Pengendalian

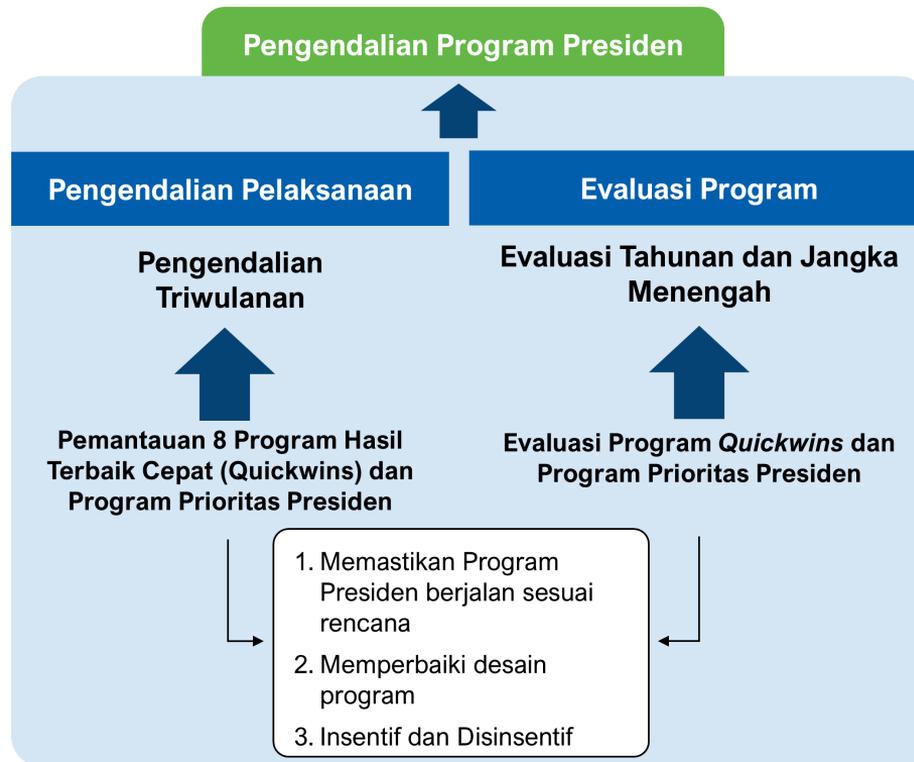
Pengendalian Pembangunan Nasional



- ▶ Pengendalian dilakukan melalui **pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja dan risiko**
- ▶ Hasil pemantauan dan evaluasi menghasilkan **rekomendasi tindakan korektif** berupa
 - ▶ Penyesuaian kebijakan
 - ▶ Penyesuaian operasional
- ▶ Pengendalian dilakukan dengan memanfaatkan **sistem informasi terpadu pengendalian** yang dapat diakses Presiden dan seluruh instansi (berjenjang)
- ▶ Penerapan **sistem insentif** berbasis **kebijakan maupun instansi** berdasarkan hasil pengendalian

Pengendalian Program Presiden

Program Presiden dikendalikan secara khusus melalui pengendalian pelaksanaan dan evaluasi program



1. Hasil pengendalian berupa percepatan program dan perbaikan desain program
2. Hasil Pengendalian menjadi dasar insentif dan disinsentif
3. Instrumen pendukung pengendalian yaitu
 1. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 2. Aplikasi umum E-monev
 3. Penilaian Kinerja
 4. Satu Data Indonesia

Sistem Informasi Pengendalian



Sistem informasi terintegrasi menjadi tools bagi semua pihak untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan

- Peningkatan efektivitas pengendalian pembangunan melalui interkoneksi e-monev, KRISNA, SAKTI dan SIPD.
- Interkoneksi menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antar K/L dan Pemda.
- Penguatan tata kelola data pembangunan melalui Satu Data Indonesia (SDI) dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai bagian dari pengendalian

Pengendalian melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

- Upaya perkuatan pengendalian yang dilakukan melalui kegiatan kolaboratif antar instansi dalam mengelola risiko pembangunan nasional.
- Penerapan MRPN dilaksanakan melalui Pembentukan Komite MRPN serta penerapan kebijakan MRPN Lintas Sektor dan Organisasi

Implementasi MRPN Lintas Sektor difokuskan pada Program Presiden



Kunci Keberhasilan Penerapan MRPN terletak pada ekosistem pendukung MRPN



- Integrasi Proses Bisnis MRPN
- Penguatan Kelembagaan
- Peningkatan Kompetensi SDM
- Sistem Insentif
- Sistem Informasi MRPN

Tata Kelola Data Pembangunan

SATU DATA
INDONESIA

Satu Data Indonesia (SDI)

- Tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah
- Pemenuhan prinsip **Satu Data Indonesia (SDI)**, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi, dan data induk

Memastikan Data Berkualitas & Tersedia

Penyediaan data Prioritas Presiden ter**standar**, memiliki **metadata** dan **kode referensi** serta dapat **dibagipakaikan**

Interoperabilitas data

Menyusun **standar tata kelola data** sehingga dapat **interoperable** dengan berbagai aplikasi dan kebijakan

Efisiensi & Efektivitas Program Pembangunan

1. Penetapan **basis satu data** referensi program
2. Efisiensi program pemerintah dengan **mengeliminasi redundansi kegiatan pendataan dan aplikasi**



Mendukung:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
2. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Transformasi Digital



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310

 (021) 31936207

 www.bappenas.go.id